

**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI JAMBI

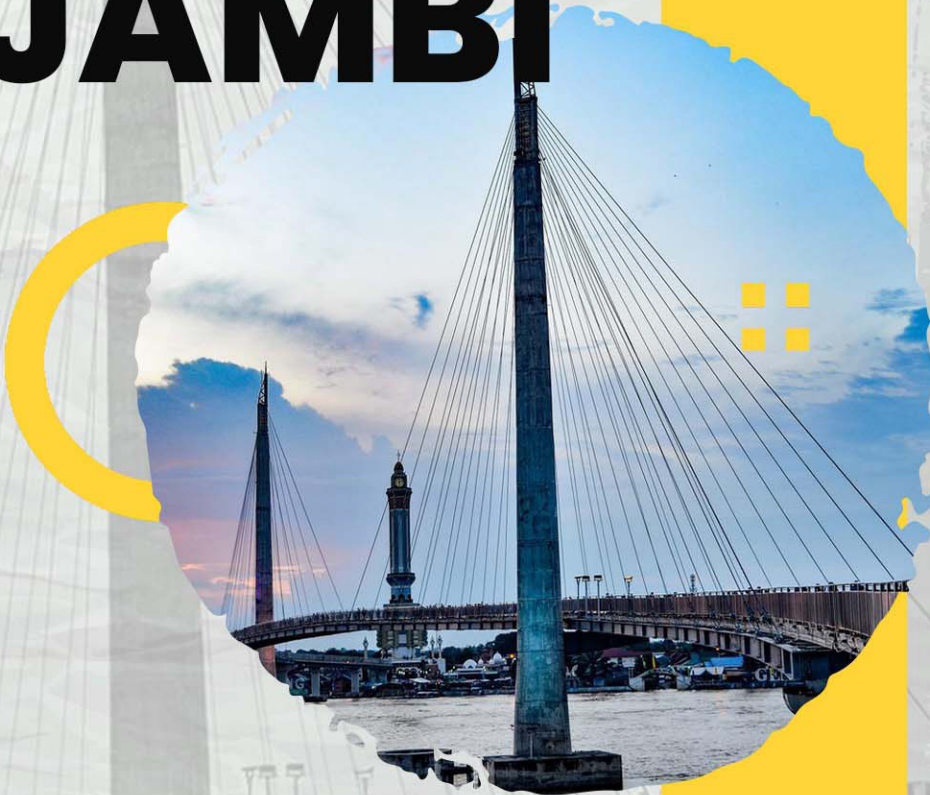




JAMBI KOTA SEBI NG

**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI JAMBI





Peta Pembinaan Provinsi Jambi

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88512-5-6

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Naomi Ratna Sari, S.Si
2. Jerry Walo, S.Sos, MM

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	3

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN BATANGHARI	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN BUNGO	12
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	13
Aspek Satuan Inovasi Daerah	14
C. KABUPATEN KERINCI	19
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	20
Aspek Satuan Inovasi Daerah	21
D. KABUPATEN MERANGIN	27
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	28
Aspek Satuan Inovasi Daerah	29
E. KABUPATEN MUARO JAMBI	35
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	36
Aspek Satuan Inovasi Daerah	37
F. KABUPATEN SAROLANGUN	43
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	43
Aspek Satuan Inovasi Daerah	44
G. KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	50
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	51
Aspek Satuan Inovasi Daerah	52
H. KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	57
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	58
Aspek Satuan Inovasi Daerah	59
I. KABUPATEN TEBO	65
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	66
Aspek Satuan Inovasi Daerah	67
J. KOTA JAMBI	73
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	74
Aspek Satuan Inovasi Daerah	75

L. KOTA SUNGAI PENUH	83
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	84
Aspek Satuan Inovasi Daerah	85
BAB III REKOMENDASI KEBIJAKAN	
A. Kabupaten Batanghari	91
B. Kabupaten Bungo	91
C. Kabupaten Kerinci	91
D. Kabupaten Merangin	91
E. Kabupaten Muaro Jambi	91
F. Kabupaten Sarolangun	92
G. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	92
H. Kabupaten Tanjung Jabung Timur	92
I. Kabupaten Tebo	92
J. Kota Jambi	92
K. Kota Sungai Penuh	92

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Batanghari
- Gambar 2 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Batanghari
- Gambar 3 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Batanghari
- Gambar 4 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Batanghari
- Gambar 5 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Batanghari
- Gambar 6 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Batanghari
- Gambar 7 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Batanghari
- Gambar 8 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Batanghari
- Gambar 9 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Batanghari
- Gambar 10 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Batanghari
- Gambar 11 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12 Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bungo
- Gambar 13 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bungo
- Gambar 14 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Bungo
- Gambar 15 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bungo
- Gambar 16 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bungo
- Gambar 17 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bungo
- Gambar 18 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Bungo
- Gambar 19 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bungo
- Gambar 20 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bungo

Gambar 21 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bungo

Gambar 22 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kerinci

Gambar 24 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kerinci

Gambar 25 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kerinci

Gambar 26 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kerinci

Gambar 27 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kerinci

Gambar 28 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kerinci

Gambar 29 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Kerinci

Gambar 30 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kerinci

Gambar 31 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kerinci

Gambar 32 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kerinci

Gambar 33 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Merangin

Gambar 35 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Merangin

Gambar 36 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Merangin

Gambar 37 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Merangin

Gambar 38 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Merangin

Gambar 39 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Merangin

Gambar 40 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Merangin

Gambar 41 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Merangin

Gambar 42 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Merangin

Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Merangin

Gambar 44 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 45 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 46 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 47 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 48 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 49 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 50 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 51 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 52 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 53 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 54 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Gambar 55 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 56 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sarolangun

Gambar 57 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sarolangun

Gambar 58 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sarolangun

Gambar 59 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sarolangun

Gambar 60 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sarolangun

Gambar 61 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sarolangun

Gambar 62 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Sarolangun

Gambar 63 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sarolangun

Gambar 64 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sarolangun

Gambar 65 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sarolangun

Gambar 66 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 67 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 68 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 69 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 70 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 71 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 72 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 73 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 74 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 75 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 76 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Gambar 77 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 78 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Gambar 79 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Gambar 80 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Gambar 81 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Gambar 82 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Gambar 83 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Gambar 84 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Gambar 85 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Gambar 86 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Gambar 87 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 88 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tebo

Gambar 89 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tebo

Gambar 90 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tebo

Gambar 91 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tebo

Gambar 92 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tebo

Gambar 93 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tebo

Gambar 94 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Tebo

Gambar 95 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tebo

Gambar 96 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tebo

Gambar 97 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tebo

Gambar 98 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 99 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Jambi

Gambar 100 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Jambi

Gambar 101 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Jambi

Gambar 102 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Jambi

Gambar 103 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Jambi

Gambar 104 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Jambi

Gambar 105 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Jambi

Gambar 106 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Jambi

Gambar 107 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Jambi

Gambar 108 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Jambi

Gambar 109 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 110 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Sungai Penuh

Gambar 111 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sungai Penuh

Gambar 112 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Sungai Penuh

Gambar 113 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Sungai Penuh

Gambar 114 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Sungai Penuh

Gambar 115 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Sungai Penuh

Gambar 116 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Sungai Penuh

Gambar 117 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Sungai Penuh

Gambar 118 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Sungai Penuh

Gambar 119 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Sungai Penuh

Gambar 120 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Batanghari beserta Skor Kematangannya

Tabel 3 Daftar Inovasi Kabupaten Bungo beserta Skor Kematangannya

Tabel 4 Daftar Inovasi Kabupaten Kerinci beserta Skor Kematangannya

Tabel 5 Daftar Inovasi Kabupaten Merangin beserta Skor Kematangannya

Tabel 6 Daftar Inovasi Kabupaten Muaro Jambi beserta Skor Kematangannya

Tabel 7 Daftar Inovasi Kabupaten Sarolangun beserta Skor Kematangannya

Tabel 8 Daftar Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 9 Daftar Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 10 Daftar Inovasi Kabupaten Tebo beserta Skor Kematangannya

Tabel 11 Daftar Inovasi Kota Jambi beserta Skor Kematangannya

Tabel 12 Daftar Inovasi Kota Sungai Penuh beserta Skor Kematangannya



BAB I

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Jambi. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jambi yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

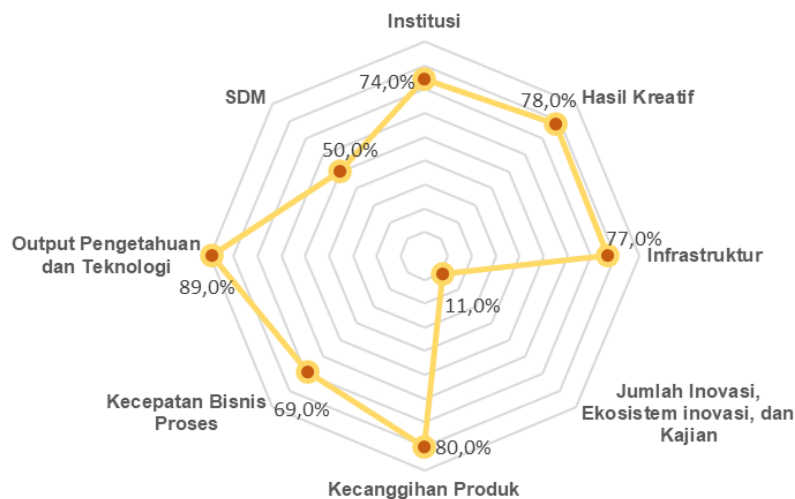
ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
		Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian
	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	
	Roadmap SIDA	
	SDM	Nilai IPM
		Penghargaan Bagi Inovator
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
Sosialisasi Inovasi Daerah		



BAB II

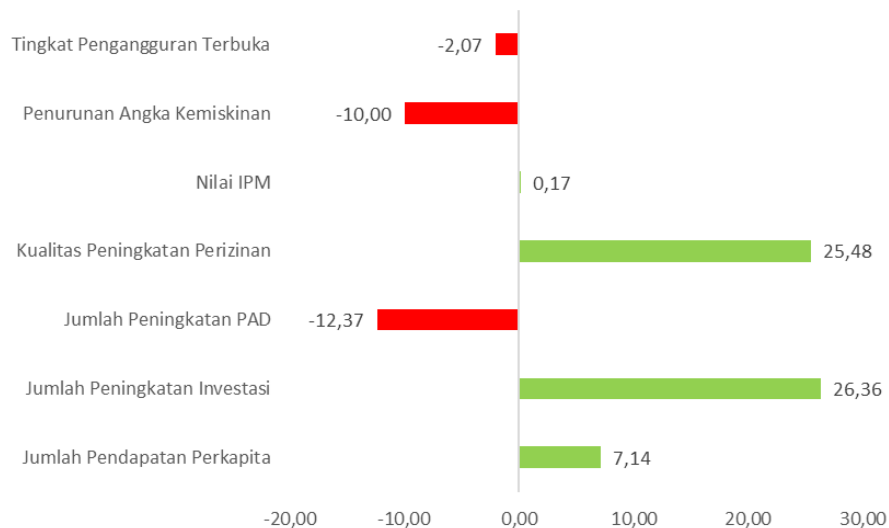
A. KABUPATEN BATANGHARI



Gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Batanghari

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Batanghari memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 89.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 11.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Batanghari

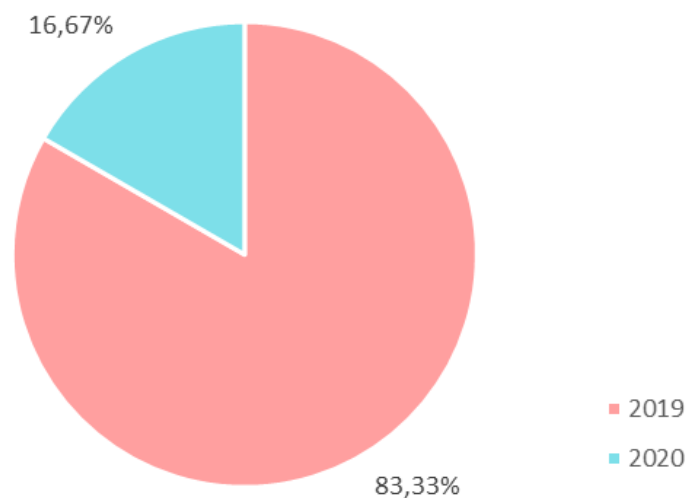
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Batanghari belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,07%, dimana nilai tersebut masih cukup kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 10.00% yang mana angka tersebut cukup jauh dari kondisi nasional yang turun sebesar 0.02%. Kemudian dari sisi PAD juga mengalami penurunan cukup besar yaitu 12,37% yang juga cukup jauh dibandingkan kondisi rata-rata nasional yang naik sebesar 8%.

Sementara itu perbaikan tercermin pada Kualitas Peningkatan Perizinan yang mengalami kenaikan sebesar 25.48% di mana nilai tersebut melampaui rata-rata kenaikan kualitas peningkatan perizinan pemda secara nasional sebesar 5%. Demikian pula dengan Realisasi Investasi yang naik sebesar 26.36% yang mana cukup jauh dengan rata-rata realisasi investasi seluruh pemda yang naik sebesar 0.45%. Terakhir ada indikator Pendapatan Perkapita yang naik sebesar 7.14% nilai tersebut berkebalikan dengan rata-rata Pendapatan Perkapita seluruh wilayah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

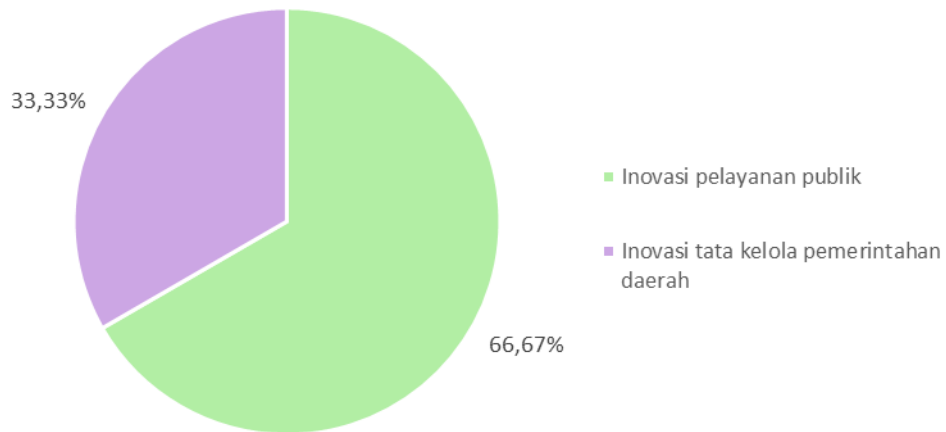
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Batanghari

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Batanghari telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 1 (16.67%) inovasi dari 6 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 5 (83.33%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

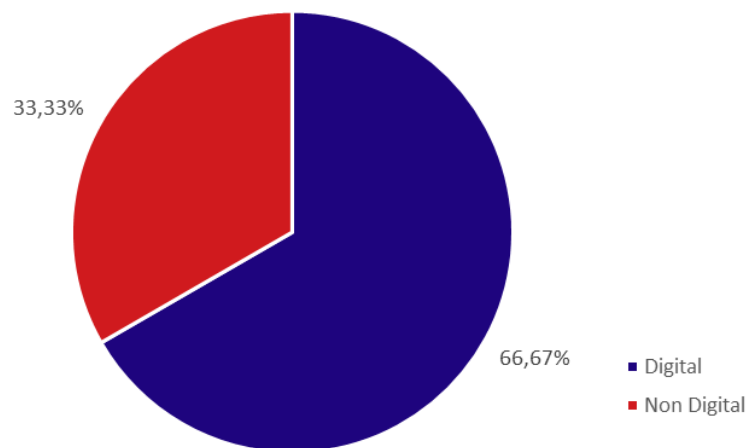
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Batanghari

Berdasarkan bentuk inovasi, inovasi tata kelola pemerintahan daerah mendominasi dari segi kuantitas, yaitu terdapat 4 (66,67%) dan 2 (33,33%) inovasi lainnya merupakan inovasi dengan bentuk pelayanan publik serta belum ada inovasi bentuk lainnya yang dilaporkan pada tahun 2021.

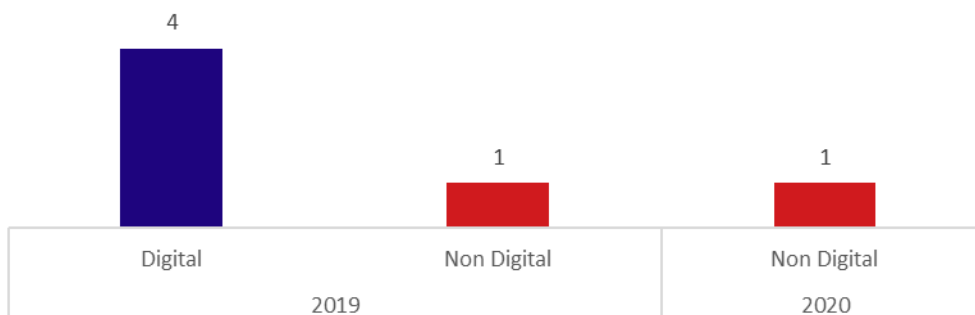
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Batanghari

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 4 (66,67%) dari 6 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Batanghari merupakan inovasi digital, kemudian 2 (33,33%) inovasi merupakan inovasi non digital.

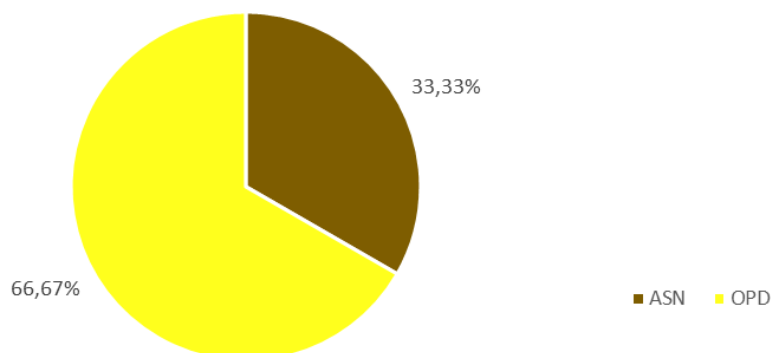
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Batanghari

Jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya bagi inovasi digital sementara untuk inovasi non digital tetap. Inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 4 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 0 inovasi. Kemudian inovasi non digital tidak mengalami perubahan dari sisi jumlah di mana pada tahun 2019 dan 2020 ada 1 inovasi yang baru mulai diterapkan.

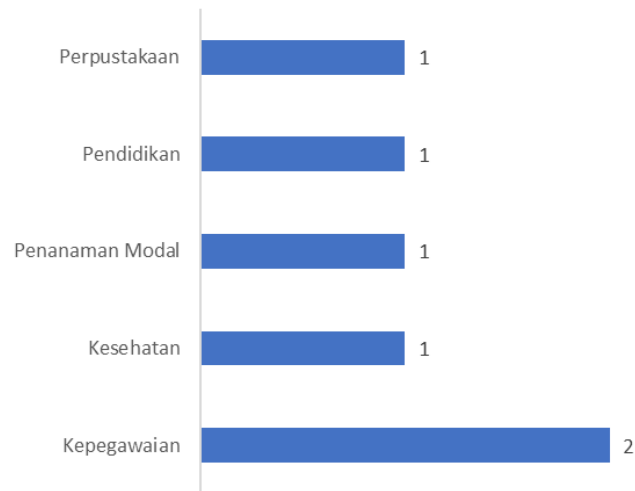
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Batanghari

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Batanghari pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 4 (66.67%) inovasi sementara 2 (33.33%) lainnya diinisiasi oleh Aparatur Sipil Negara. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

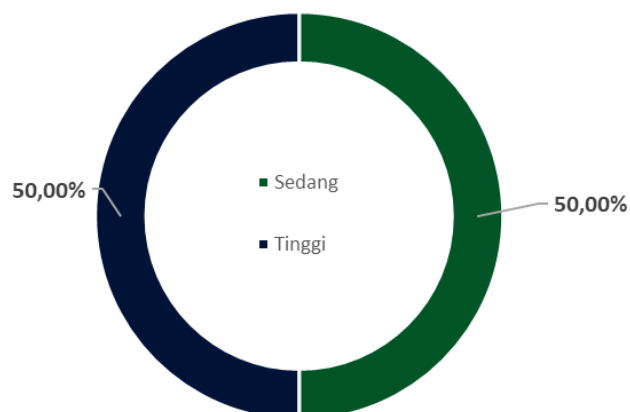
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 8 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Batanghari

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Batanghari berdasarkan urusan pemerintahan belum banyak mengingat kuantitas yang dilaporkan, tetapi dapat dilihat bahwa inovasi yang dilaporkan tidak hanya terpusat pada satu atau dua urusan. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kepegawaian dengan 2 inovasi dari 6 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, baru ada 2 (dua) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Urusan lain yang telah dilaporkan inovasinya pada tahun 2021 adalah perpustakaan dan penanaman modal yang masing-masing berjumlah 1 inovasi.

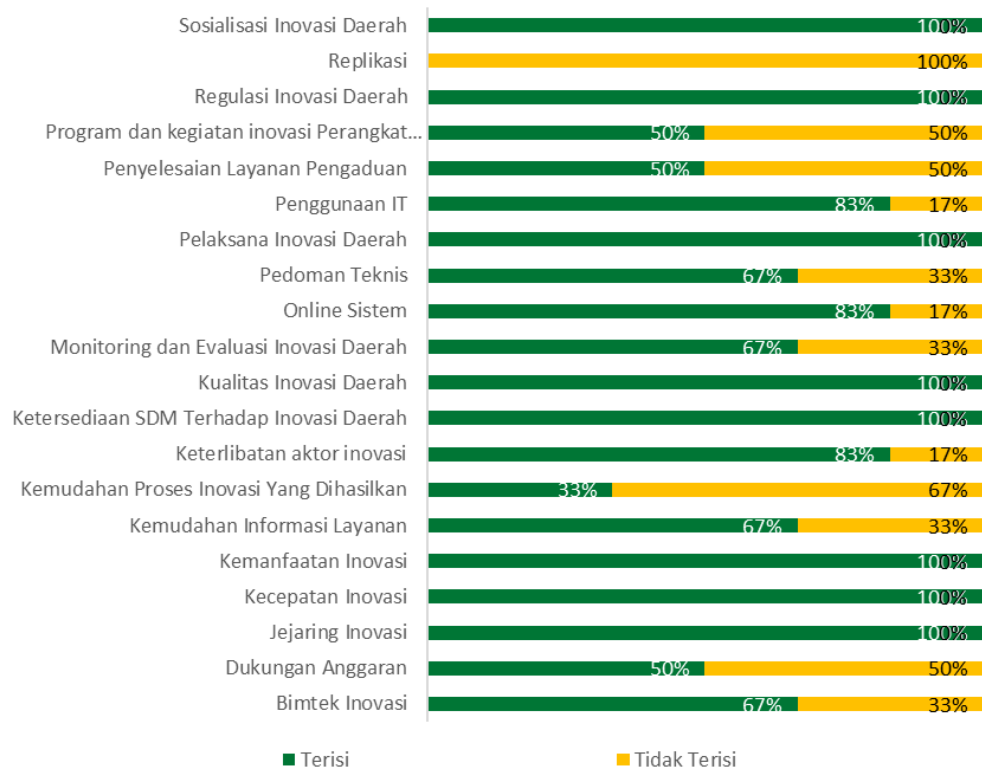
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Batanghari

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi Kabupaten Batanghari terbagi dalam dua rentang secara seimbang yaitu sedang dengan rentang skor kematangan 50 s.d. 100 sebanyak 3 inovasi dan tinggi dengan skor kematangan lebih dari atau sama dengan 100 sebanyak 3 inovasi.

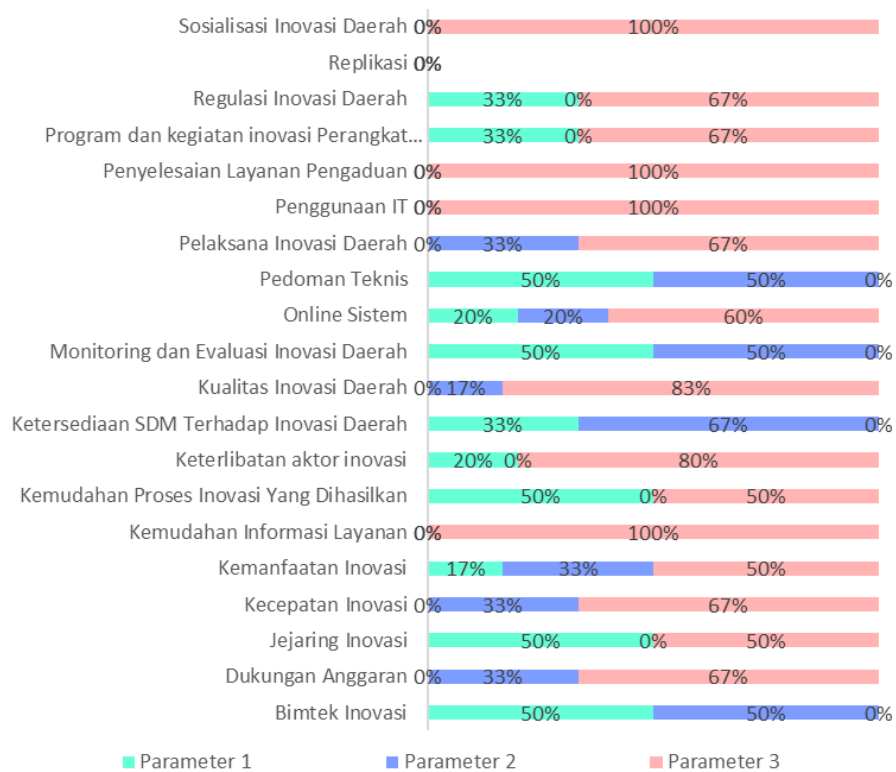
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Batanghari

Dari 6 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Batanghari, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 25.00% sedangkan 69,86% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Pelaksana Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Sosialisasi Inovasi Daerah serta Kualitas Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100% artinya 6 dari 6 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Batanghari telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Sosialisasi Inovasi Daerah, dan Kemudahan Informasi Layanan sebesar 100%, artinya 100% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi sebesar 67% artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan dan Jejaring Inovasi serta Bimtek Inovasi sebesar 50% artinya separuh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk ke-empat indikator tersebut.

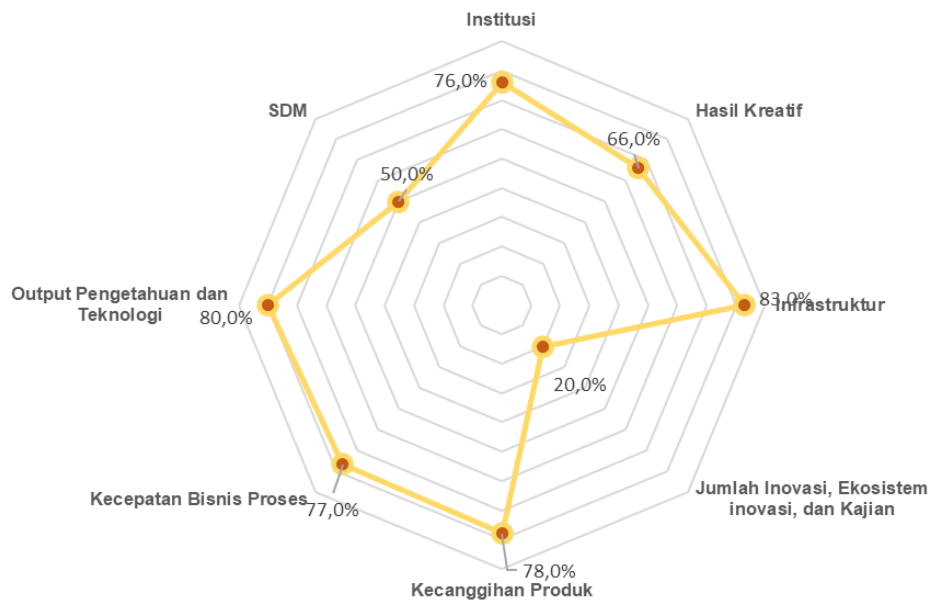
j. Daftar Inovasi Kabupaten Batanghari beserta Skor Kematangannya

Tabel 2 Daftar Inovasi Kabupaten Batanghari beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Aplikasi SiKepo (Sistem Kehadiran Pegawai Online)	129
Inovasi e-Library (Perpustakaan Berbasis elektronik/iBatanghari)	113

Inovasi Posyandu remaja Duta Kesehatan Reproduksi (Kespro)	56
Aplikasi e-Kinerja (Buku Kerja Pegawai Elektronik)	131
Aplikasi PPDB Online	85
SIIP JOK (Sistem Informasi Investasi dan Perizinan melalui Jaringan Online Keliling)	50

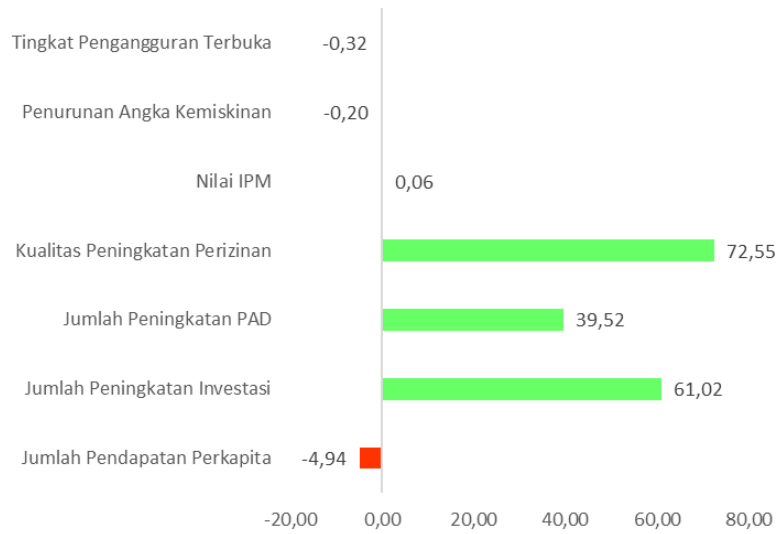
B. KABUPATEN BUNGO



Gambar 12 Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Bungo

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Bungo memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 20.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



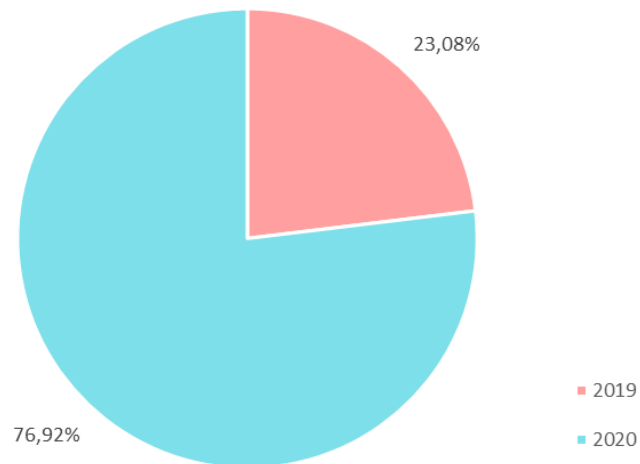
Gambar 13 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bungo

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bungo telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.32%, dimana nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.20%, angka tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Jumlah Pendapatan Perkapita mengalami penurunan sebesar 4,94%, angka ini lebih rendah dari nilai tengah parameter 2 indikator tersebut, yaitu turun sebesar 1.85%.

Meskipun terdapat beberapa penurunan pada 3 indikator di atas, Kabupaten Bungo telah menunjukkan perbaikan diantaranya Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.06% dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 72.55%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Pemerintah Kabupaten Bungo juga mengalami perbaikan pada Jumlah Pendapatan PAD sebesar 39.52% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan sebesar 1.85%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 61.02% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Aspek Satuan Inovasi Daerah.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

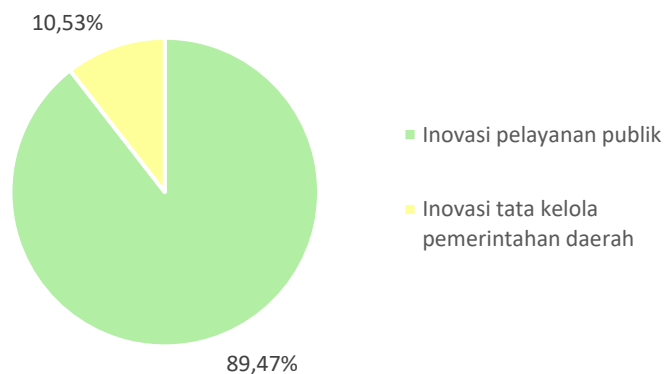
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Bungo

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bungo telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 10 (76.92%) inovasi dari 13 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 3 (23.08%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

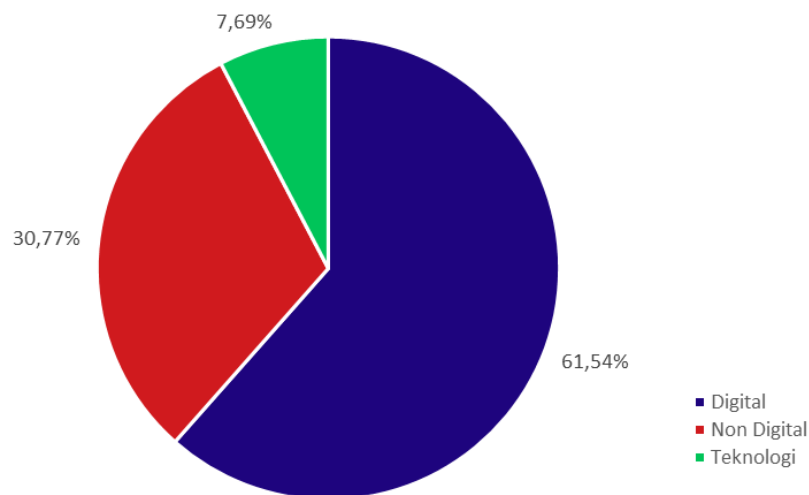
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Bungo

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bungo, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum terlapor. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 17 (89.47%) inovasi dan 2 (10.53%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

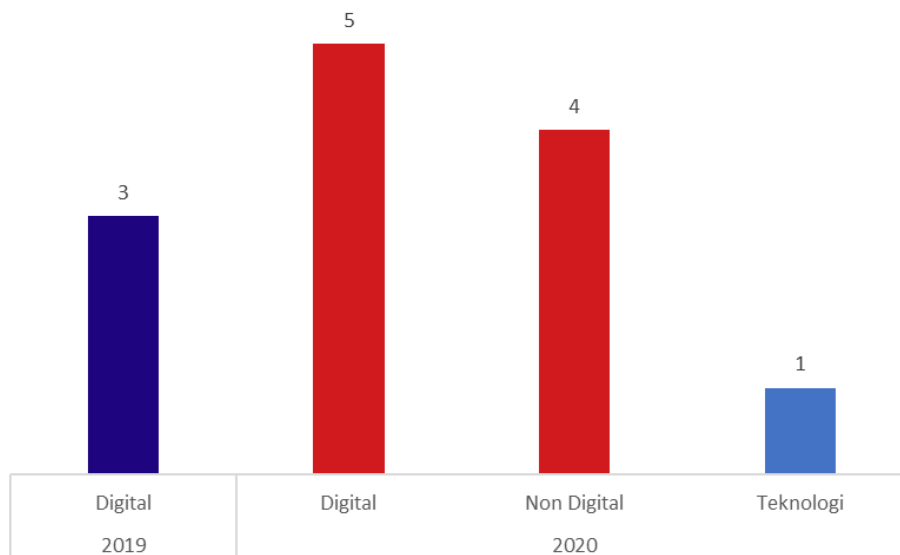
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Bungo

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 8 (89.47%) dari 19 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Bungo merupakan inovasi non digital dan 2 (10.53%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

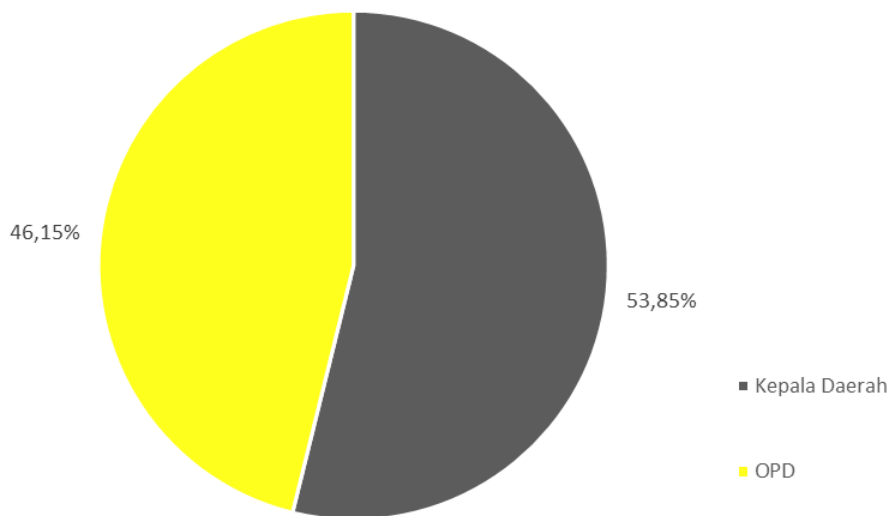


Gambar 17 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Bungo

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa 4 inovasi non digital baru mulai diterapkan pada tahun 2020 di mana pada tahun 2019 belum ada inovasi non digital. Begitu pula dengan inovasi Teknologi yang baru mulai diterapkan di tahun 2020. Demikian

pula dengan inovasi digital mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 terdapat 3 inovasi dan meningkat menjadi 5 inovasi.

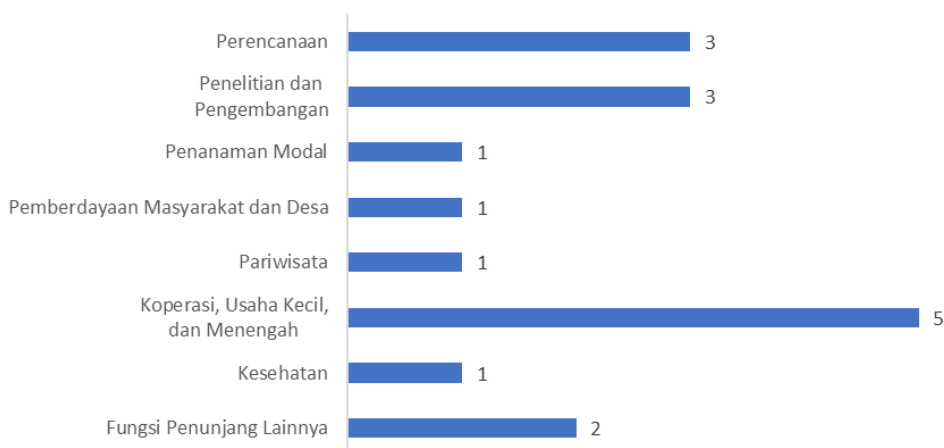
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 18 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Bungo

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Bungo pada tahun 2021 diinisiasi oleh kepala daerah, yaitu sejumlah 7 (53.85%) inovasi sementara 6 (46.15%) inovasi lainnya diinisiasi oleh perangkat daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 19 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Bungo

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Bungo berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah dengan 4 inovasi dan 3 urusan Perencanaan kemudian 3 inovasi urusan Penelitian dan Pengembangan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 1 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum melaporkan.

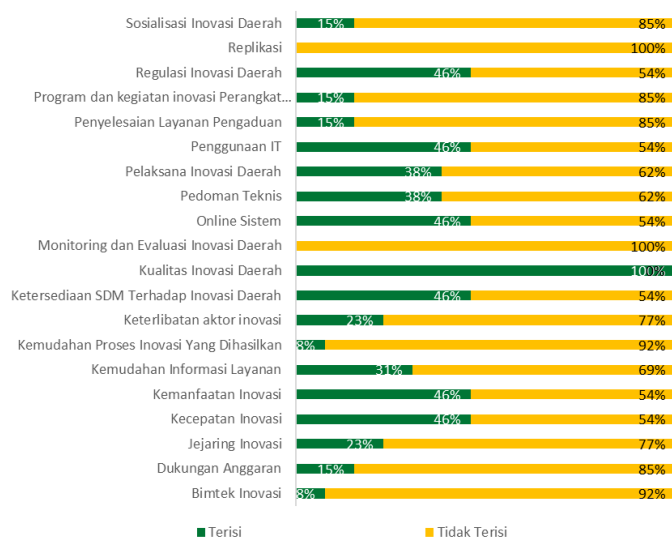
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Bungo

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan rendah, dimana terdapat 7 (53,85%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah dan terdapat 6 (46,15%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

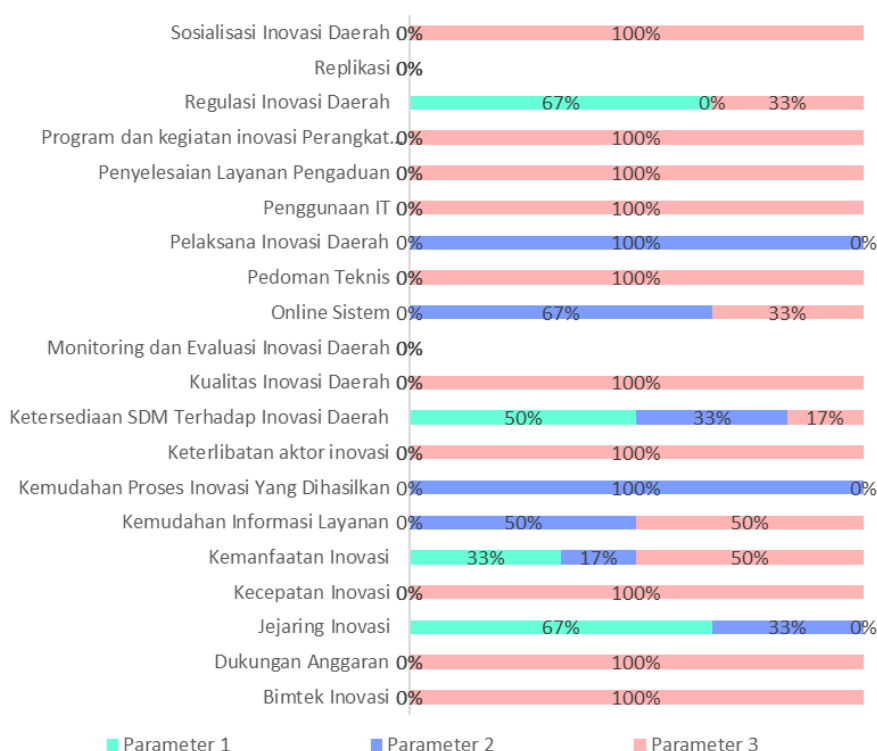


Gambar 21 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bungo

Dari 13 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bungo, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 30,38% sedangkan 69,62% lainnya telah terisi data pendukung. Ada indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu Kualitas Inovasi Daerah. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Bungo telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya belum ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan kegiatan Inovasi dalam RKP, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Pedoman Teknis, Kualitas Inovasi, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kecepatan Penciptaan Inovasi, dan Dukungan Anggaran serta Bimtek Inovasi, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan dan Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang

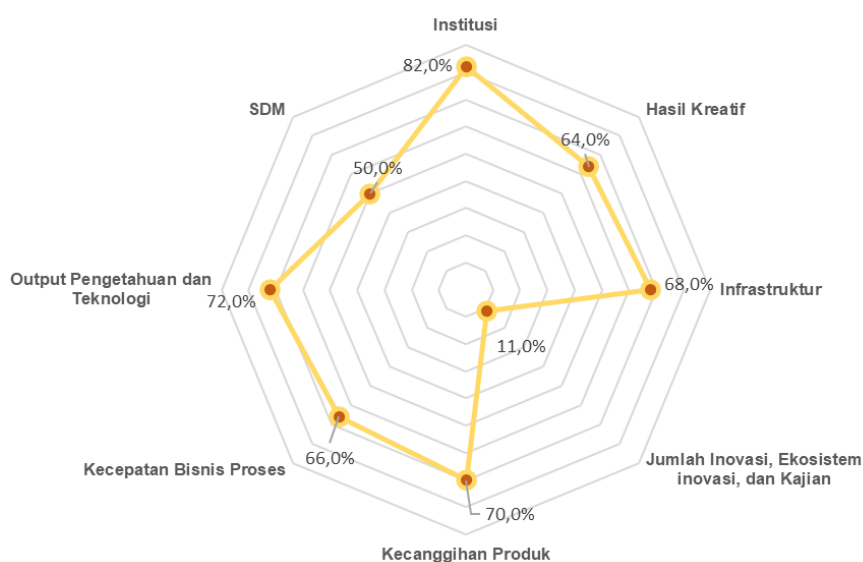
tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Jejaring Inovasi sebesar 67% artinya 67% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk kedua indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Bungo beserta Skor Kematangannya

Tabel 3 Daftar Inovasi Kabupaten Bungo beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional Modern	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Cafe	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada sektor Wisata	15
BungoMasterMart	23
Pengelolaan Pajak Daerah "E-PAD"	94
Aplikasi BPHTB Kabupaten Bungo	91
Perancangan dan Pengembangan Sistem Bungo Emergency Service (BES) Informasi 119 Berbasis Android	80
E-Planning	61
Sistem Aplikasi dan Database Potensi Ruang Mikro Kabupaten Bungo	96
Aplikasi E-RPJMD Kabupaten Bungo	50

C. KABUPATEN KERINCI



Gambar 23 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kerinci

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kerinci memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 82.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 11.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 24 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kerinci

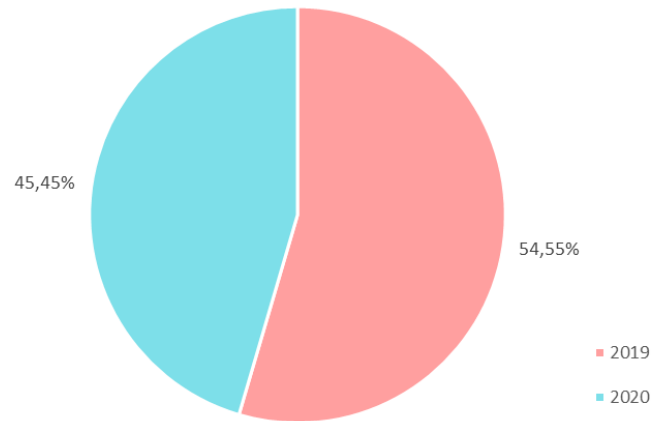
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kerinci telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 14,32% yang mana nilai ini jauh lebih rendah dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 1,85%.

Sebaliknya, enam indikator lain mengalami perbaikan. Pertama, indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang mengalami penurunan sebesar 0,32%. Angka tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Kedua, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0.17%, angka tersebut lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.26% dimana nilai tersebut masih sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 35,12%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 12,99% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator

Peningkatan PAD pada Kabupaten Kerinci menunjukkan kenaikan sebesar 92.68%, yang jauh lebih tinggi dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kerinci

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kerinci telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 6 (54,55%) inovasi dari 11 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 5 (45,45%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

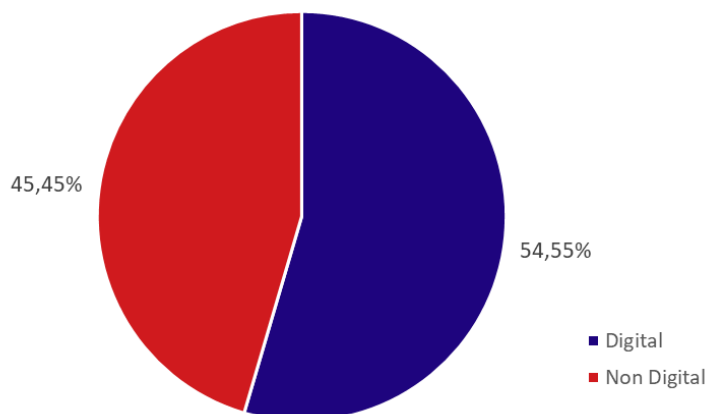
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kerinci

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kerinci, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum terlapor. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 7 (63,64%) inovasi dan 4 (36,36%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

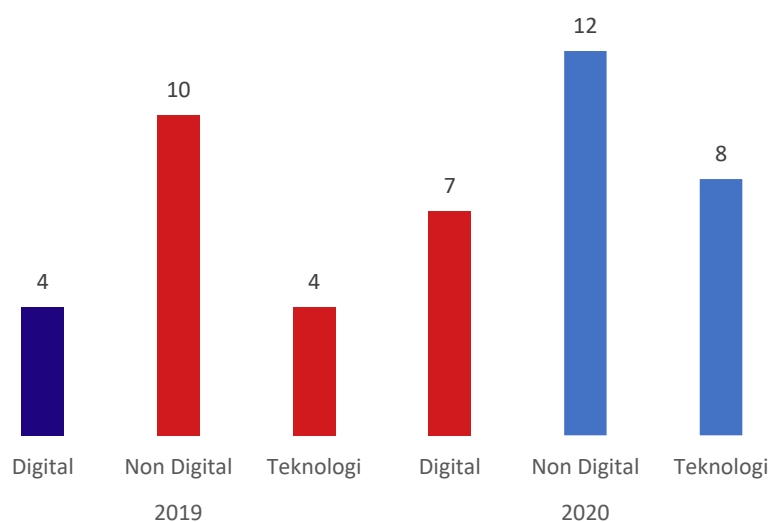
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 27 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kerinci

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 6 (54,55%) dari 10 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Kerinci merupakan inovasi non digital dan 4 (45,45%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

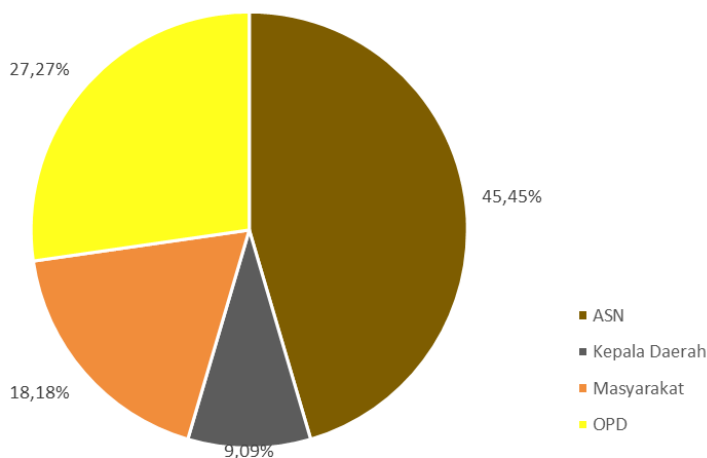
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kerinci

Terdapat kenaikan jumlah sebesar 3 inovasi non digital yang baru diterapkan di tahun 2020 dari tahun 2019. Sayangnya tidak diikuti oleh kenaikan jumlah inovasi digital. Pada tahun 2020 inovasi digital yang mulai diterapkan di Kabupaten Kerinci ada 1 yang mana jumlah ini lebih sedikit dari tahun 2019 dengan 5 inovasi digital mulai diterapkan.

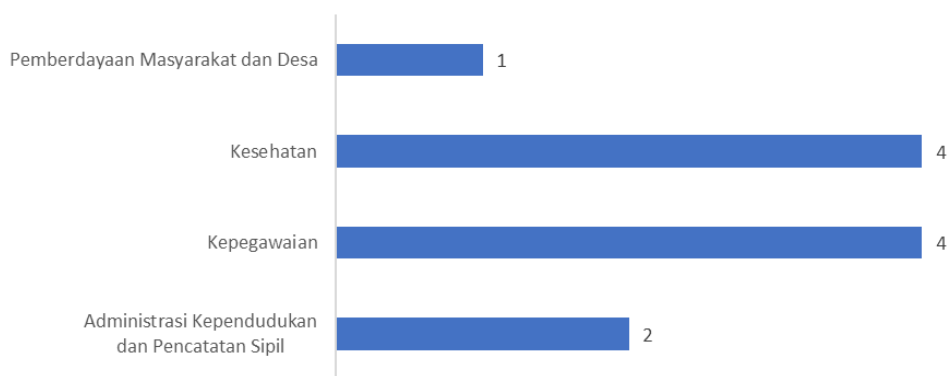
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kerinci

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kerinci pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sejumlah 5 (45,45%) inovasi sementara 3 (27,27%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah, kemudian 2 (18,18%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat dan terakhir 1 (9,09%) diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

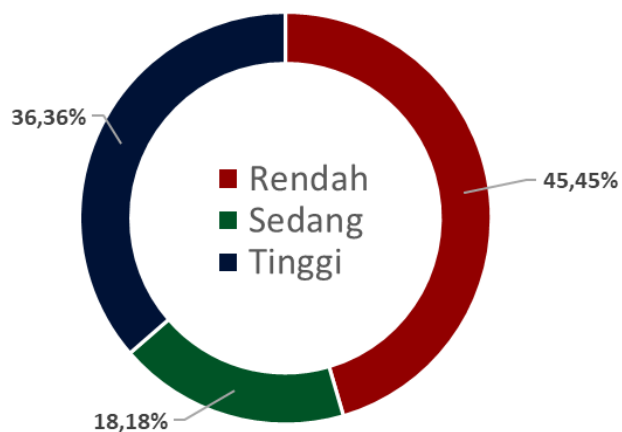


Gambar 30 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kerinci

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Kerinci berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan dan kepegawaian dengan 4 inovasi kemudian 2 inovasi dari urusan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil dan 1 inovasi merupakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 4 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum melaporkan.

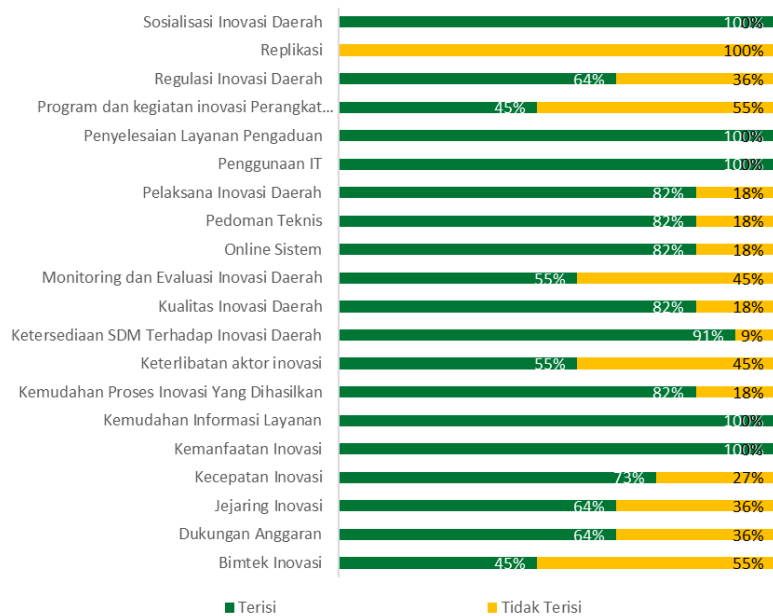
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kerinci

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan rendah, dimana terdapat 4 (57,89%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Kemudian terdapat 4 (36,36%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi dan 2 (18,18%) inovasi lainnya mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

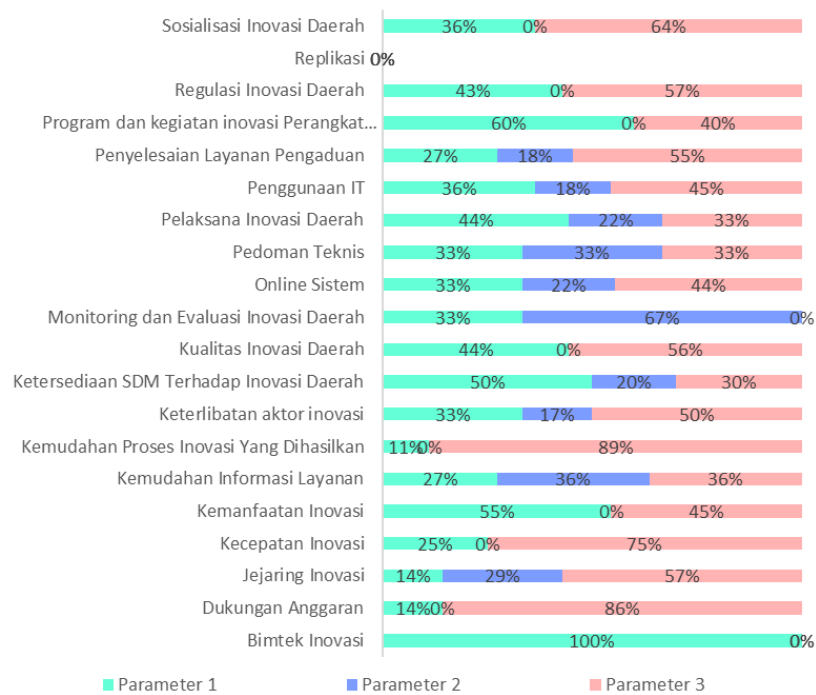


Gambar 32 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kerinci

Dari 11 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kerinci, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 26,82% sedangkan 73,18% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu: Indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Penggunaan IT, Kemudahan Informasi Layanan dan Kemanfaatan Inovasi. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kerinci telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan sebesar 89%, artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 67% artinya mayoritas inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

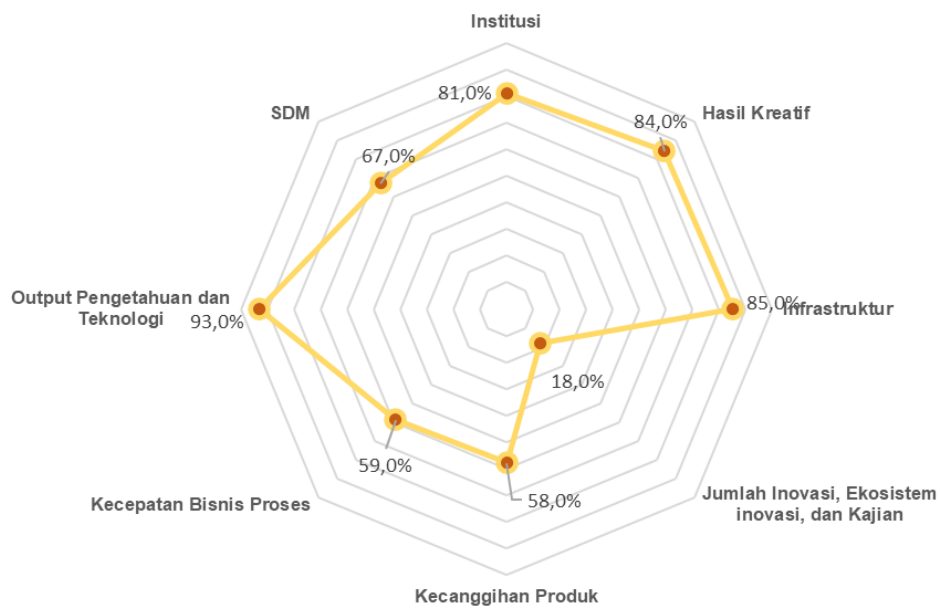
j. Daftar Inovasi Kabupaten Kerinci beserta Skor Kematangannya

Tabel 4 Daftar Inovasi Kabupaten Kerinci beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
E-ABSENSI KERINCI	100
PAK KAMLING (Pelayanan Administrasi Kependudukan Perekaman Keliling)	106
PAK DEWA (Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis WA)	94
Rukun Tetangga Ikut Serta Mengawasi Wanita dan Anak (RT ISTIMEWA)	2
Selamatkan Ibu Dengan Donor Darah (SIDORA)	13

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)	111
Elektronik Remunerasi dan Kinerja (E-RK)	125
Laju Kemilau cinta (layanan Antar Jemput Kelas Ibu Hamil andalan Utama Cegah Kematian Ibu dan Neonatal)	7
JASUKE (Jagung Untuk Ibu Menyusui OKE)	36
Sistem Informasi Administrasi Presensi (SIAP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci	91
Website Desa : https://sebukar.id	47

D. KABUPATEN MERANGIN



Gambar 34 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Merangin

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Merangin memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 93,0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 18,0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



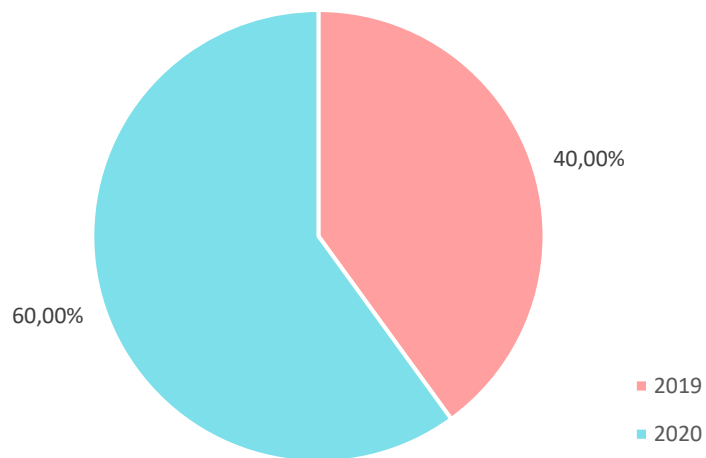
Gambar 35 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Merangin

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Merangin belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran yang mengalami kenaikan sebesar 1,06%. Nilai tersebut lebih rendah dari standar parameter indeks inovasi daerah tahun 2021 yang naik sebesar 0,92%. Selanjutnya angka kemiskinan juga naik sebesar 0,15% yang juga lebih tinggi dibanding standar parameter yang turun sebesar 0,02%. Jumlah PAD juga belum membaik dilihat dari 5,46% penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut tidak sejalan dengan standar parameter yang naik sebesar 8%.

Sebaliknya, tiga indikator lain mengalami perbaikan. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.12% dimana nilai tersebut masih sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 77,44%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 1676,49% sangat jauh dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

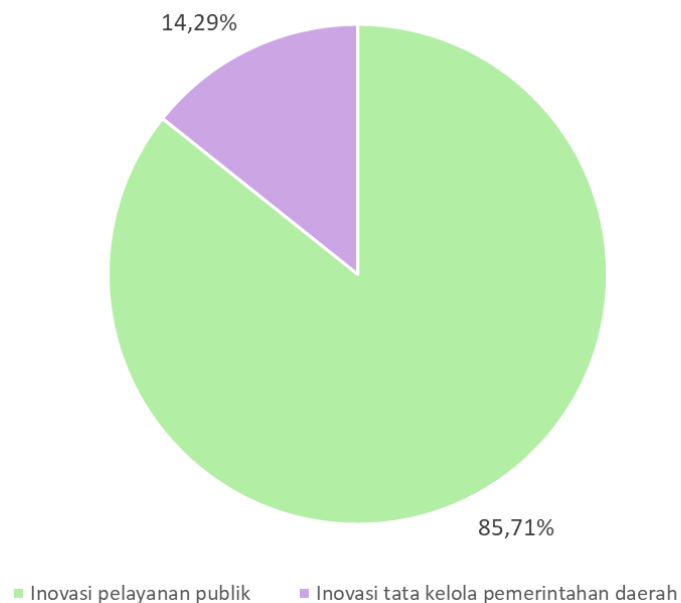
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Merangin

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merangin telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 8 (57,14%) inovasi dari 14 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 6 (42,86%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

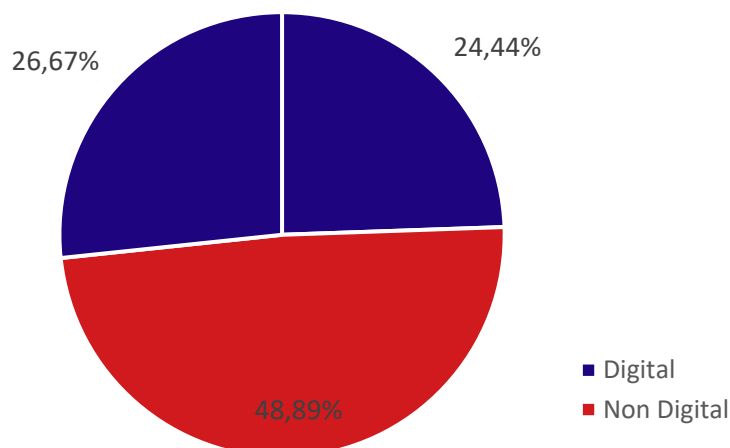
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Merangin

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merangin, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, sementara inovasi bentuk lainnya belum terlapor. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 12 (85,71%) inovasi dan 2 (14,29%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

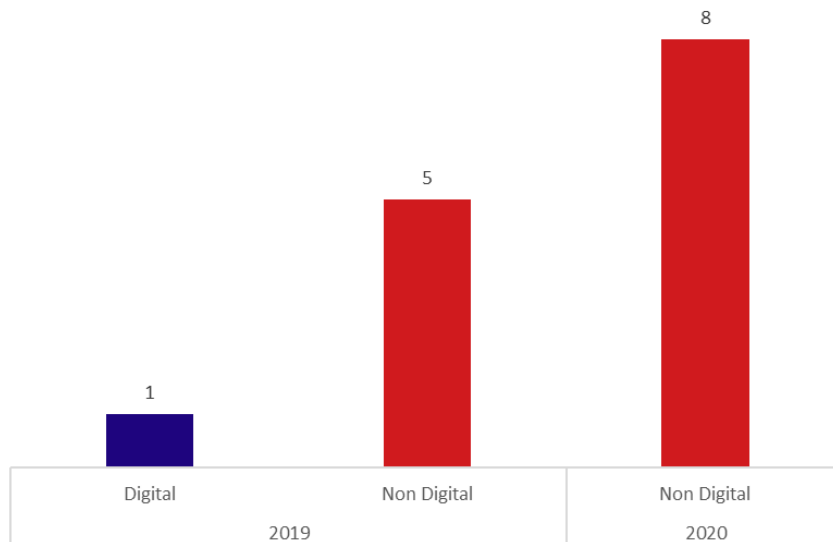
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 38 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Merangin

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 13 (92,86%) dari 14 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Merangin merupakan inovasi non digital dan 1 (7,14%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

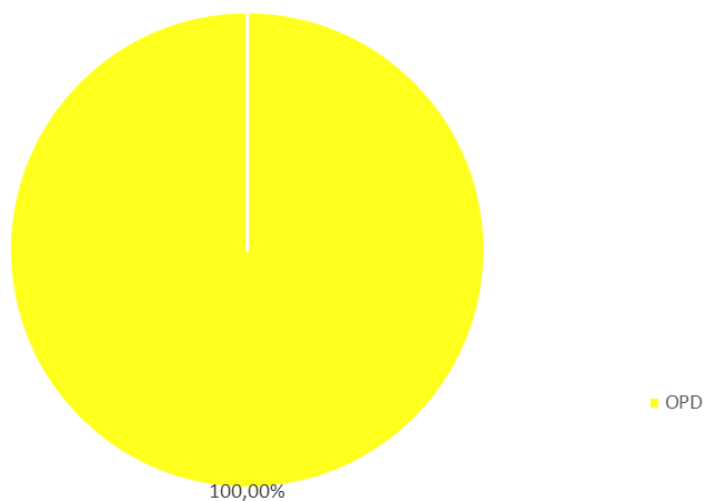
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 39 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Merangin

Terdapat kenaikan jumlah sebesar 3 inovasi non digital yang baru diterapkan di tahun 2020 dari tahun 2019. Sayangnya tidak diikuti oleh kenaikan jumlah inovasi digital. Pada tahun 2020 tidak ada inovasi digital yang mulai diterapkan di Kabupaten Merangin yang mana jumlah ini lebih sedikit dari tahun 2019 dengan 1 inovasi digital mulai diterapkan.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

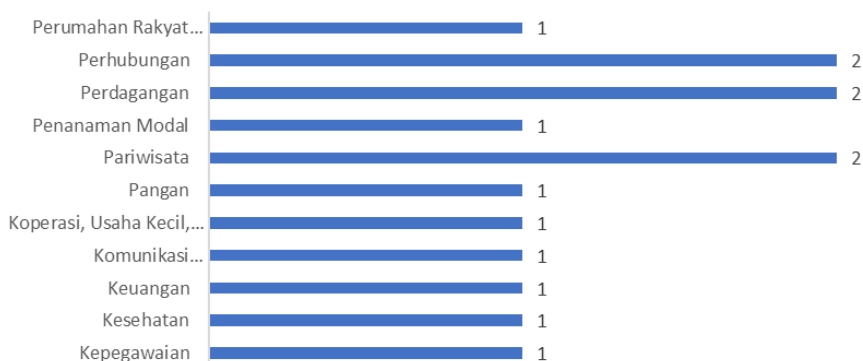


Gambar 40 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Merangin

Seluruh inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Merangin pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 14 (100%) inovasi sementara inovasi yang

diinisiasi oleh Anggota DPRD, ASN, Masyarakat dan Kepala Daerah belum dilaporkan di tahun 2021.

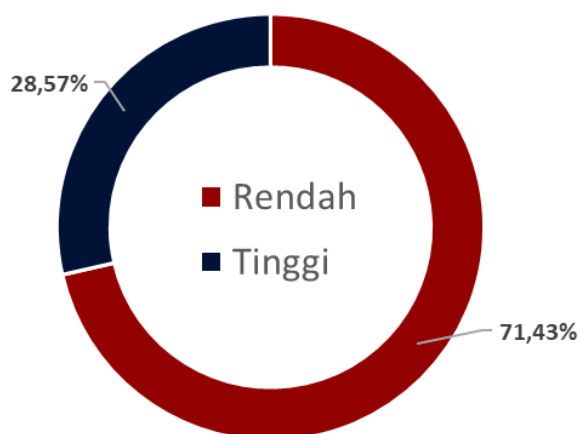
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 41 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Merangin

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Merangin berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan perhubungan, perdagangan, dan pariwisata dengan 2 inovasi kemudian 8 urusan lainnya sama rata dengan satu urusan inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dengan masing-masing inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum terlaporkan.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

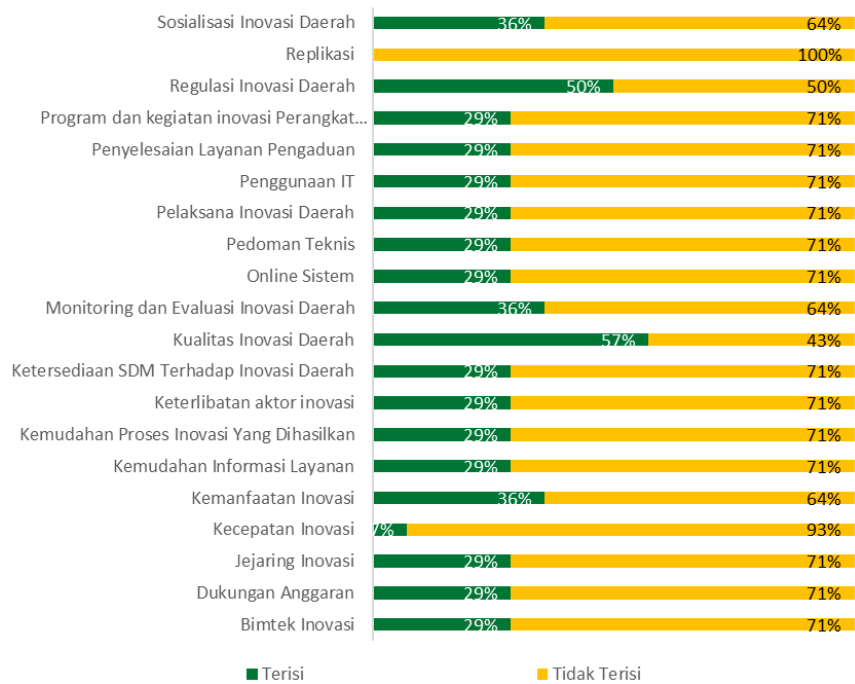


Gambar 42 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Merangin

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan rendah, dimana terdapat 10 (71,43%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Kemudian terdapat 4 (28,57%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang

mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

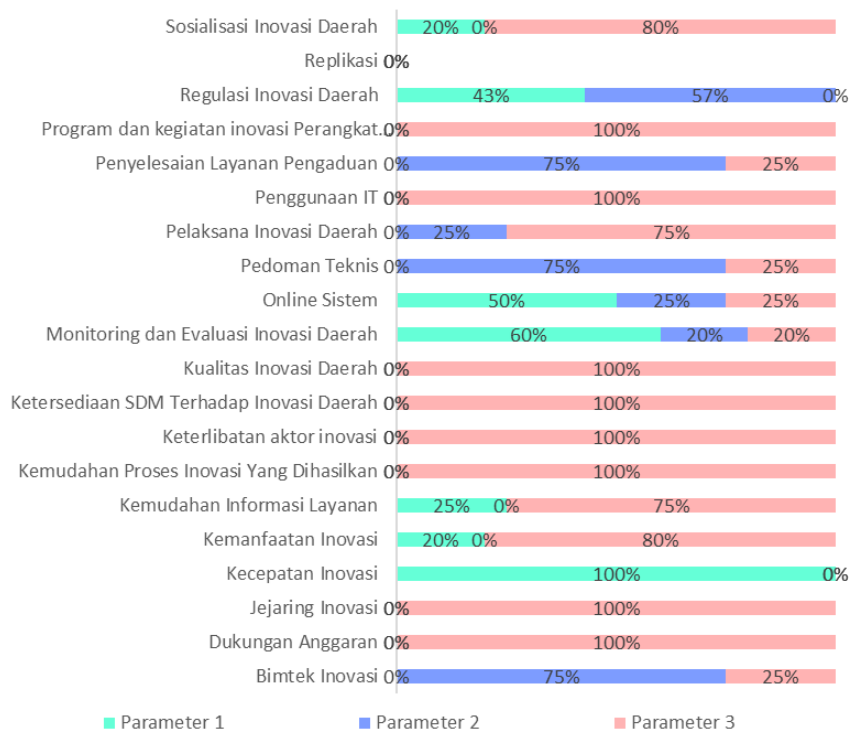


Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Merangin

Dari 14 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merangin, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 70,36% sedangkan 29,64% lainnya telah terisi data pendukung. Tidak ada indikator dengan tingkat keterisian 100%. Indikator dengan keterisian tertinggi adalah Kualitas Inovasi Daerah dengan keterisian 57%. Artinya, 57% inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Merangin telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

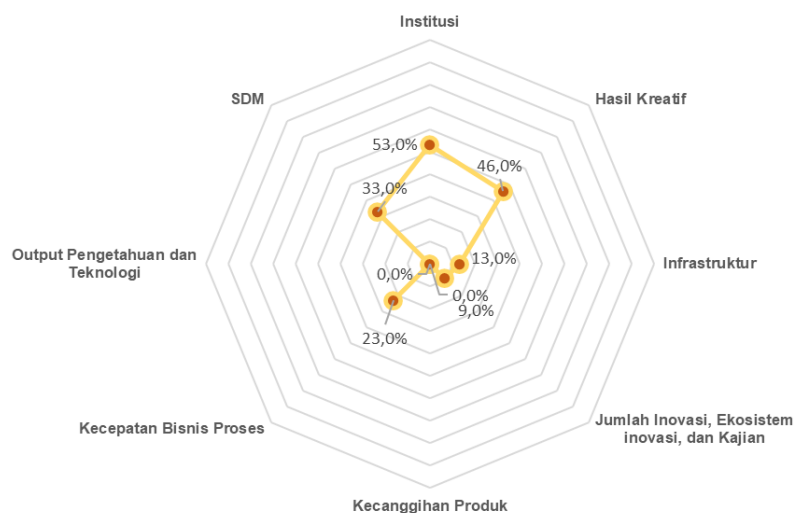
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Jejaring Inovasi dan Dukungan Anggaran sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan, Pedoman Teknis, dan Bimtek Inovasi dengan 67% artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Merangin beserta Skor Kematangannya

Tabel 5 Daftar Inovasi Kabupaten Merangin beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
GOYANG MARINA (Gerakan Hotel Yang Aman Dari Corona)	0
TRANSPORTASI DAN PELAYANAN CAKEP (CEPAT, AKSES, EFEKTIF DAN EFISIEN)	0
TAMAN SI SEHAT (BERWISATA DENGAN AMAN, BERSIH DAN SEHAT)	0
CAFE BEDASI MERONA (CAFE BERSIH DAN SIGAP MENOLAK CORONA)	0
NEW NORMAL LIFE PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0
NEW NORMAL LIFE PASAR TRADISIONAL	15
NEW NORMAL LIFE PASAR MODERN	0
LPPL RADIO STREAMING DISKOMINFO MERANGIN MELALUI APLIKASI ANDROID DI ERA DIGITAL	117
GERDU TATIBO (Gerakan Terpadu Tabir Timur Berdayo)	121
Gerakan Serentak Sadar Ternak Sehat (GESERTS)	106
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN LAYANAN CAKEP (CEPAT AKSES, EFEKTIF DAN PAS)	113
Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dengan Menggunakan Sarana Helpdesk-Pojok Akuntansi	33
Pelayanan Daerah Sulit Air (PEDAL AIR MERANGIN)	29
Lesehan Prima Suku Anak Dalam (LESEHAN MAS ALAM)	23

E. KABUPATEN MUARO JAMBI



Gambar 45 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Muaro Jambi memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 53.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang berada pada nilai tengah (parameter 2). Namun skor variabel Kecanggihan Produk dan Output Pengetahuan dan Teknologi masih sangat rendah, yaitu 0.0% dimana artinya belum ada satupun indikator pada variabel tersebut yang telah memiliki nilai.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



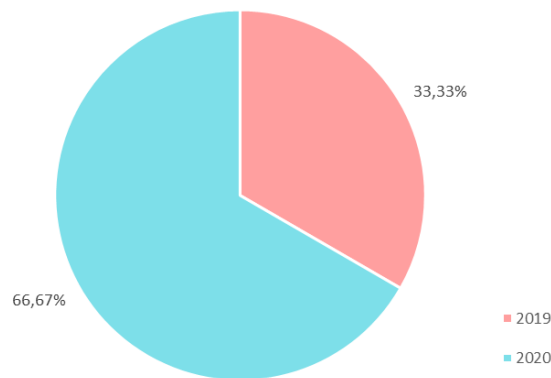
Gambar 46 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Muaro Jambi

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Muaro Jambi belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya pada indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang naik sebesar 0,23% meskipun demikian, nilai tersebut sudah lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92%. Kemudian ada Angka kemiskinan yang turun sebesar 0,01% tetapi angka ini masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 0,02%. Selanjutnya indikator Kualitas Peningkatan Perizinan yang turun sebesar 48,62%, nilai ini jauh di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah tahun 2022 yang naik sebesar 5%. Selanjutnya indikator Peningkatan PAD yang mengalami penurunan sebesar 1,06%, cukup rendah jika dibandingkan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 8%. Indikator Jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami penurunan sebesar 1,75% yang mana nilai ini sudah lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 1,85%.

Sebaliknya, enam indikator lain mengalami perbaikan. Pertama, indikator Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.17% dimana nilai tersebut masih sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 225,45% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

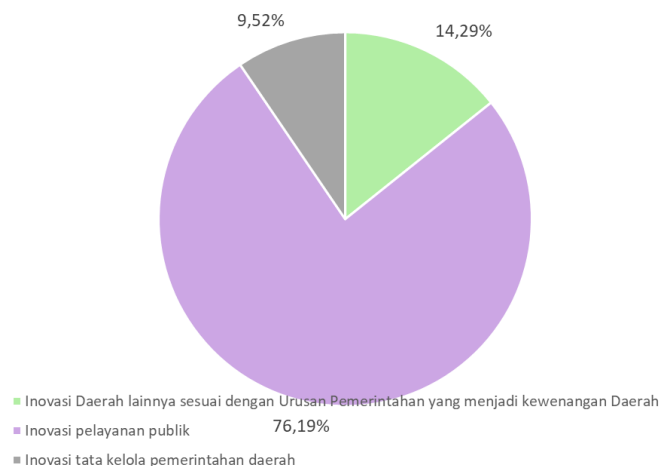
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Muaro Jambi

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Muaro Jambi telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 14 (66,67%) inovasi dari 21 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 7 (33,33%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

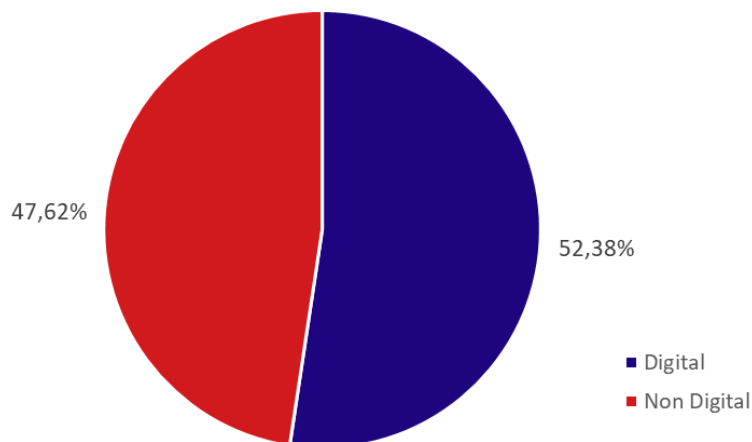


Gambar 48 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Muaro Jambi, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan

inovasi daerah lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 16 (76,17%) inovasi, 2 (9,52%) inovasi adalah tata kelola pemerintahan serta inovasi daerah bentuk lainnya dengan persentase 14,29% atau 3 inovasi.

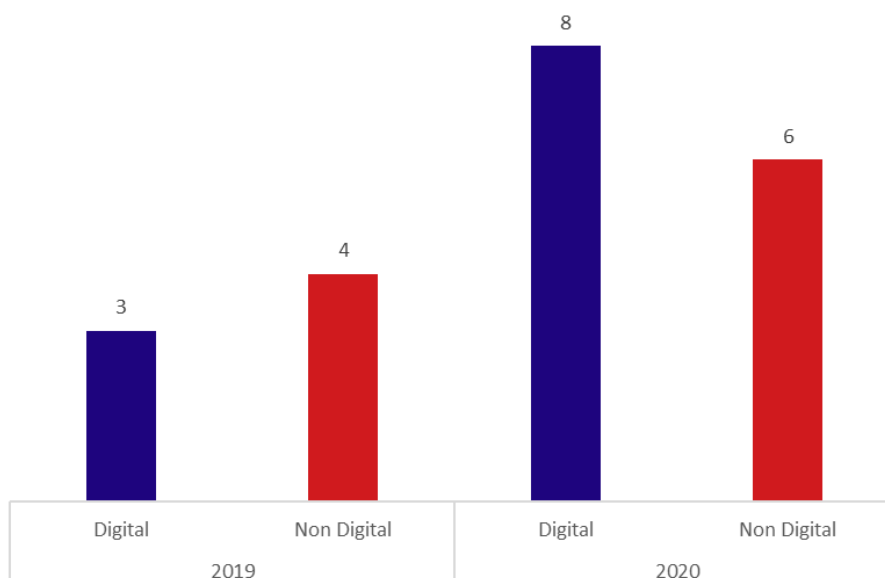
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 49 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Muaro Jambi

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 11 (52,38%) dari 21 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Muaro Jambi merupakan inovasi digital dan 10 (47,62%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

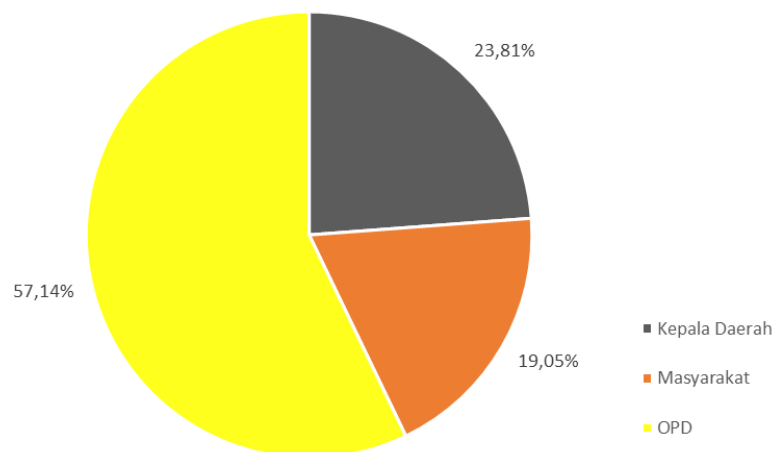


Gambar 50 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Muaro Jambi

Terdapat kenaikan jumlah baik inovasi digital maupun non digital. Pada inovasi digital terdapat kenaikan sebesar 5 inovasi digital, pada tahun 2019 ada 3 inovasi digital yang

mulai diterapkan kemudian di tahun 2020 ada 8 inovasi digital yang baru diterapkan di tahun 2020. Sejalan dengan inovasi digital, inovasi non digital juga mengalami kenaikan jumlah inovasi baru. Di tahun 2020 terdapat 6 inovasi non digital yang baru diterapkan sementara di tahun 2019 ada 4 inovasi non digital yang baru diterapkan.

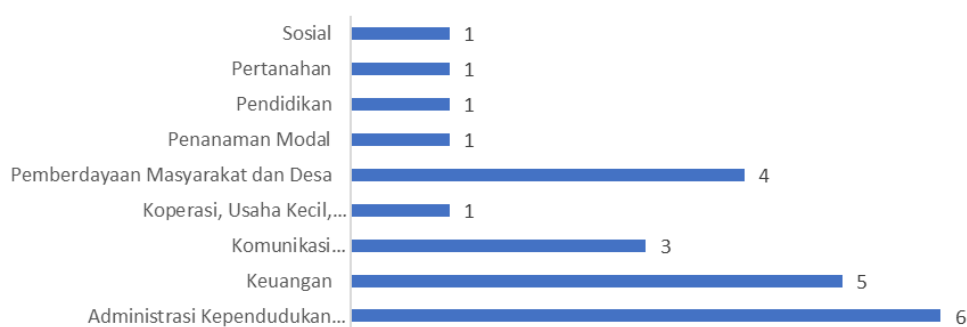
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 51 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Muaro Jambi

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 12 (57,14%) inovasi sementara 5 (23,81%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah, kemudian 4 (19,05%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD dan ASN belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 52 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Muaro Jambi

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 6 inovasi kemudian 5 inovasi dari urusan Keuangan dan 4 inovasi merupakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar

yaitu urusan Sosial dan Pendidikan dengan 1 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

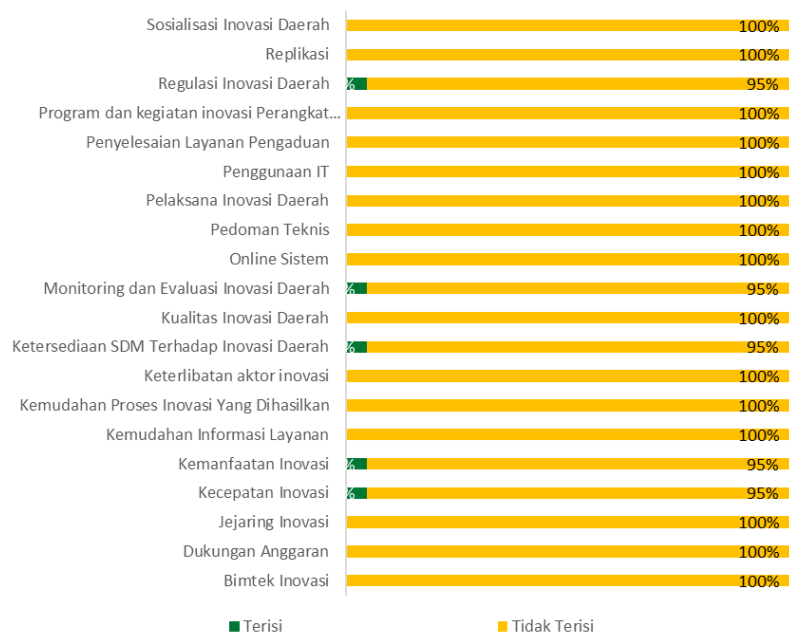
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 53 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Muaro Jambi

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi belum bisa mencapai skor kematangan di atas 50 sehingga masih berada dalam rentang rendah . Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung alam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Dari 11 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Muaro Jambi, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 98,81% sedangkan 1,19% lainnya telah terisi data pendukung. Dari 20 indikator satuan inovasi daerah, hanya ada 5 indikator yang paling tidak 1 inovasi telah memenuhi yaitu indikator Regulasi Inovasi Daerah, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemanfaatan Inovasi dan Kecepatan Penciptaan Inovasi. Sementara 15 indikator lainnya belum ada inovasi Kabupaten Muaro Jambi yang bisa memenuhi.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dari 5 indikator yang telah terisi, indikator Kemanfaatan Inovasi dan Kecepatan Penciptaan Inovasi telah memenuhi parameter 3 (maksimal) sementara 3 indikator lain yaitu Indikator Regulasi Inovasi Daerah, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah juga Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah telah memenuhi parameter 2.

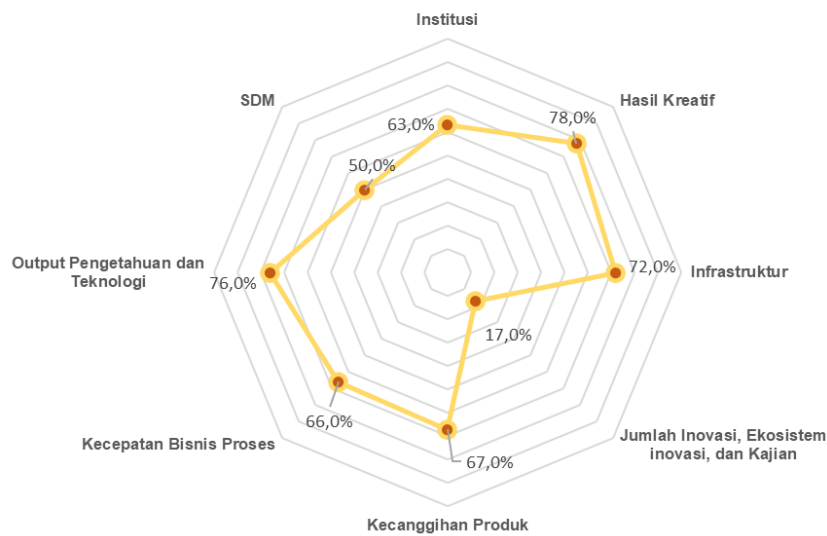
j. Daftar Inovasi Kabupaten Muaro Jambi beserta Skor Kematangannya

Tabel 6 Daftar Inovasi Kabupaten Muaro Jambi beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	0
Bakul (Market Place UKM-BUMDes)	0
PONJEN (Bank Data Desa)	0

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SICANTIK CLOUD)	0
e-BPHTB	0
Pendaftaran PBB Online	0
Pajak Daerah Lainnya	0
Aplikasi Pelaporan Pendapatan	0
Aplikasi Absen Pegawai (SIKO)	0
Laporan Sistem Adminstrasi Kependudukan	0
Pengembangan Mesin Rumput Untuk Gocar	0
Pemanfaatan Sabut Kelapa menjadi Kerajinan Rumah Tangga	0
Pembuatan Briket dari Batok Kelapa	0
Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga	0
CEKATAN (PELAYANAN REKAM CETAK KTP EL DI KANTOR KECAMATAN)	0
PEKA MANULA (PELAYANAN KEPEMILIKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MANULA DAN ORANG SAKIT)	0
SIKULUP	0
PELAYANAN PENGGANTI DOKUMEN ADMINDUK BAGI PENGANTIN YANG LAGI BERBAHAGIA (PENGANTIN BAHAGIA)	0
PELAYANAN TERINTEGRASI (SATU PERMOHONAN BANYAK LAYANAN)	0
PERAN RAJA CUKA (Pembelajaran jarak jauh, cepat, terukur, dan akuntabel)	6
PKS ANTARA BPPRD KAB. MUARO JAMBI DENGAN KANTOR PERTANAHAN KAB. MUARO JAMBI NOMOR 590/462/BPPRD/VIII/2019 DAN NOMOR 01/SPK-15.05/VIII/2019 TENTANG PBB-P2 DAN BPHTB	0

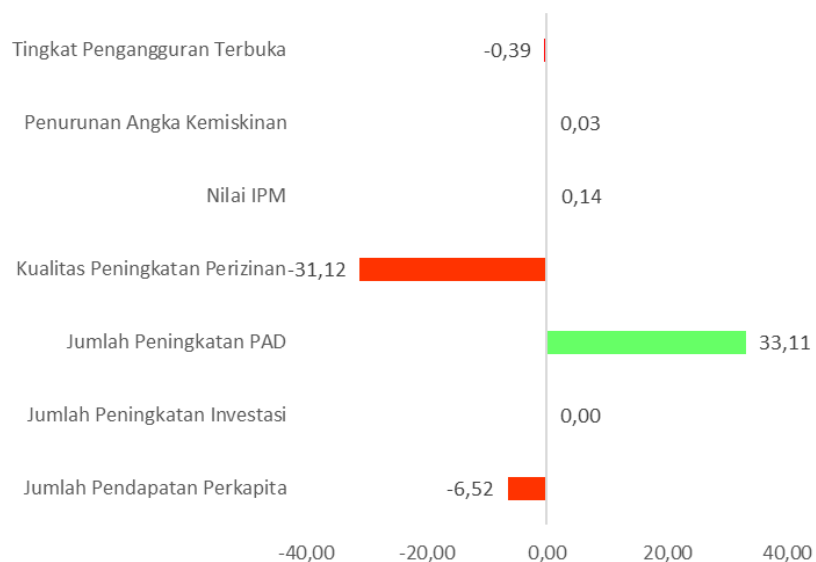
F. KABUPATEN SAROLANGUN



Gambar 56 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sarolangun memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 78.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 17.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



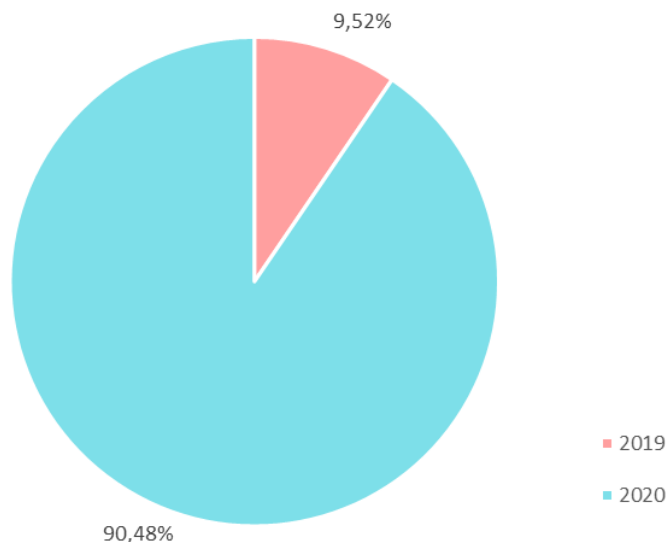
Gambar 57 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sarolangun

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sarolangun belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang turun sebesar 0,39% meskipun demikian nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 0,92%. Kemudian indikator Kualitas Perizinan yang juga turun sebesar 31,12% di mana angka tersebut cukup jauh di bawah standar nasional parameter yang naik sebesar 5%. Indikator lain yang mengalami penurunan adalah Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 6,52% yang mana nilai ini jauh lebih rendah dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 1,85%. Indikator Peningkatan Investasi belum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, kondisi tersebut berada di bawah standar nasional parameter yang naik sebesar 5%.

Sebaliknya, tiga indikator lain mengalami perbaikan. Pertama, indikator Angka Kemiskinan yang mengalami penurunan sebesar 0,03% yang mana hampir sama dengan standar nasional parameter 0,02%. Indikator kedua adalah Nilai IPM yang naik sebesar 0,14, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan standar nasional parameter yang bernilai 0 atau tetap. Terakhir, indikator Jumlah Peningkatan PAD yang naik sebesar 33,11%, cukup jauh dibandingkan dengan standar nasional parameter yang naik 5%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

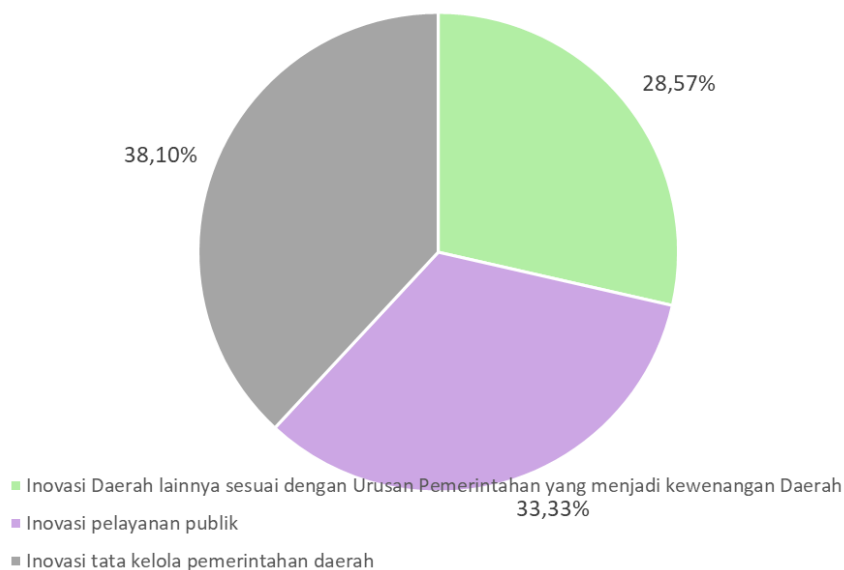


Gambar 58 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sarolangun

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sarolangun telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 19 (90,48%) inovasi dari 21 inovasi

yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 2 (9,52%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

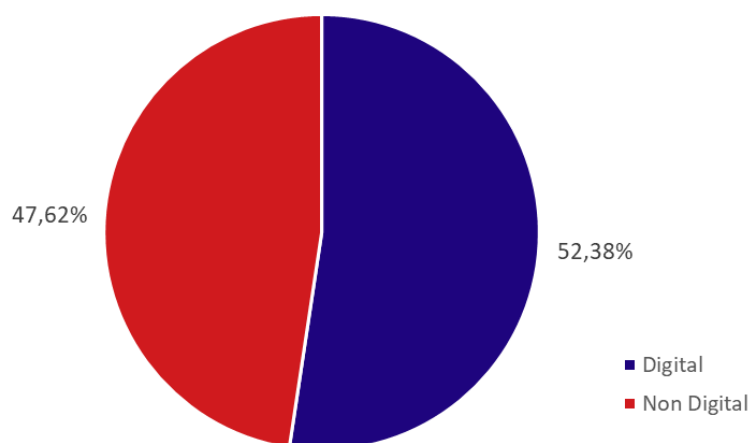
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 59 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sarolangun, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi tata kelola sejumlah 8 (38,10%) inovasi, inovasi pelayanan publik sejumlah 7 (33,33%) inovasi dan 6 (28,57%) inovasi lainnya adalah inovasi bentuk lainnya.

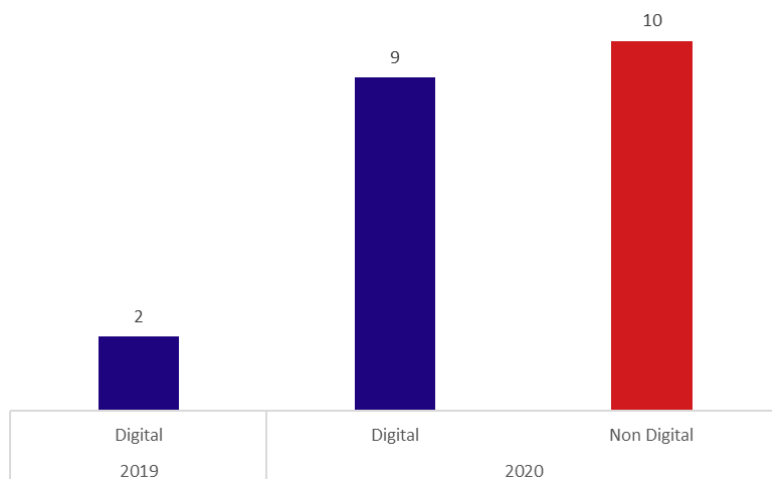
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 60 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sarolangun

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 11 (52,38%) dari 21 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Sarolangun merupakan inovasi digital dan 10 (47,62%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

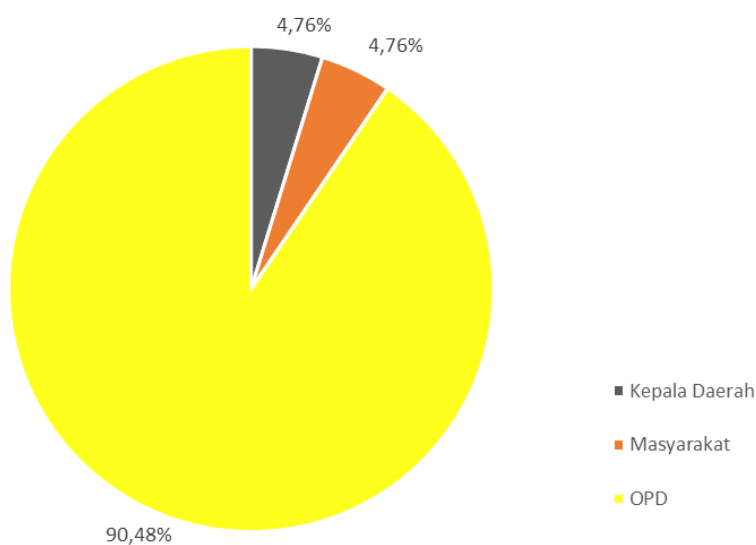
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 61 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sarolangun

Terdapat kenaikan jumlah sebesar 7 inovasi digital yang baru diterapkan di tahun 2020 dari tahun 2019. Hal ini juga diikuti oleh kenaikan jumlah inovasi digital. Pada tahun 2020 inovasi digital yang mulai diterapkan di Kabupaten Sarolangun ada 9 yang mana jumlah ini lebih banyak dari tahun 2019 dengan 2 inovasi digital mulai diterapkan. Sementara untuk inovasi non digital ada 10 inovasi yang baru diterapkan di tahun 2020.

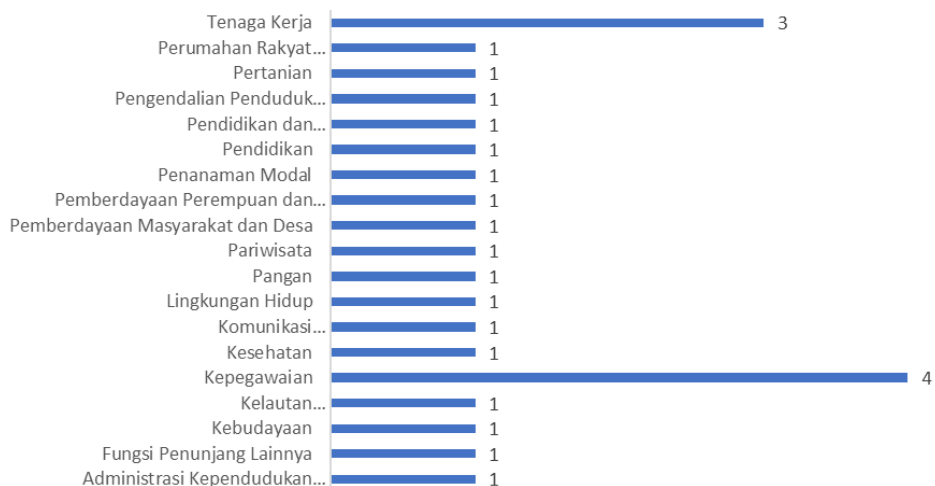
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 62 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sarolangun

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sarolangun pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 1 (90,48%) inovasi sementara 1 (4,76%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat, kemudian 1 (4,76%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara belum dilaporkan di tahun 2021.

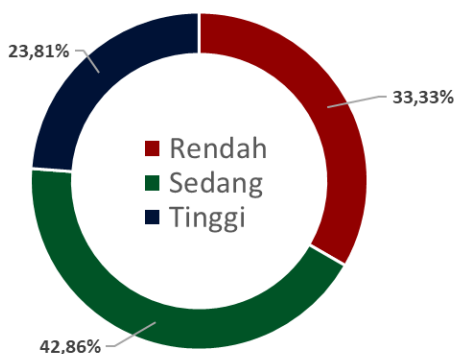
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 63 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sarolangun

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sarolangun berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kepegawaian dengan 4 inovasi kemudian 3 inovasi dari urusan tenaga kerja dan masing-masing 1 inovasi pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan Pelatihan, Pendidikan, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pariwisata, Pangan, Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika, Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Kebudayaan, Fungsi Penunjang Lainnya, serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

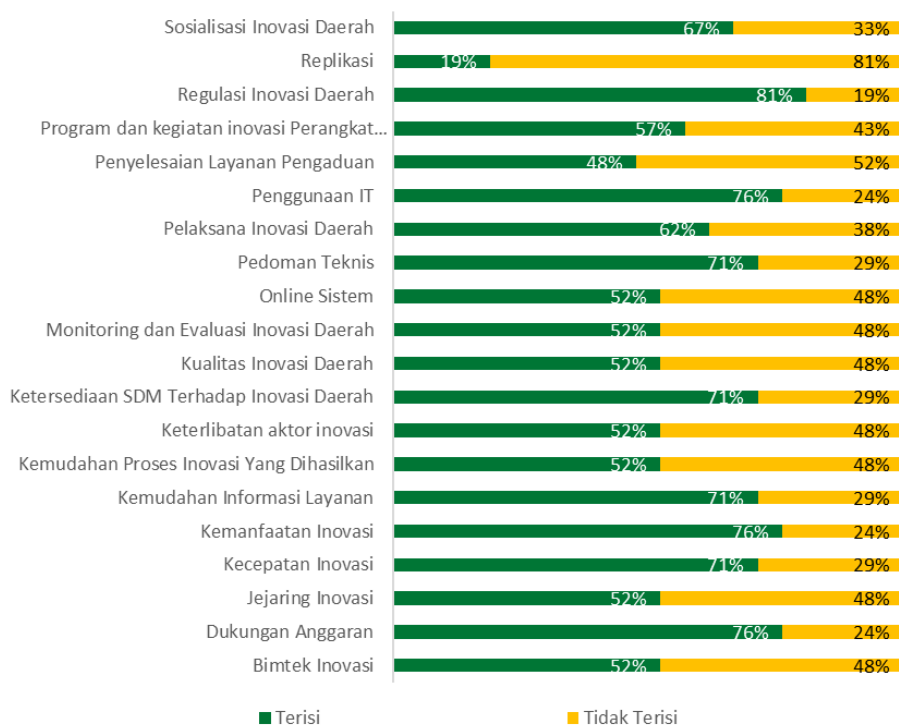
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 64 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sarolangun

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan sedang, dimana terdapat 9 (42,86%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Kemudian terdapat 7 (33,33%) inovasi sudah mencapai skor kematangan rendah dan 5 (23,81%) inovasi lainnya mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

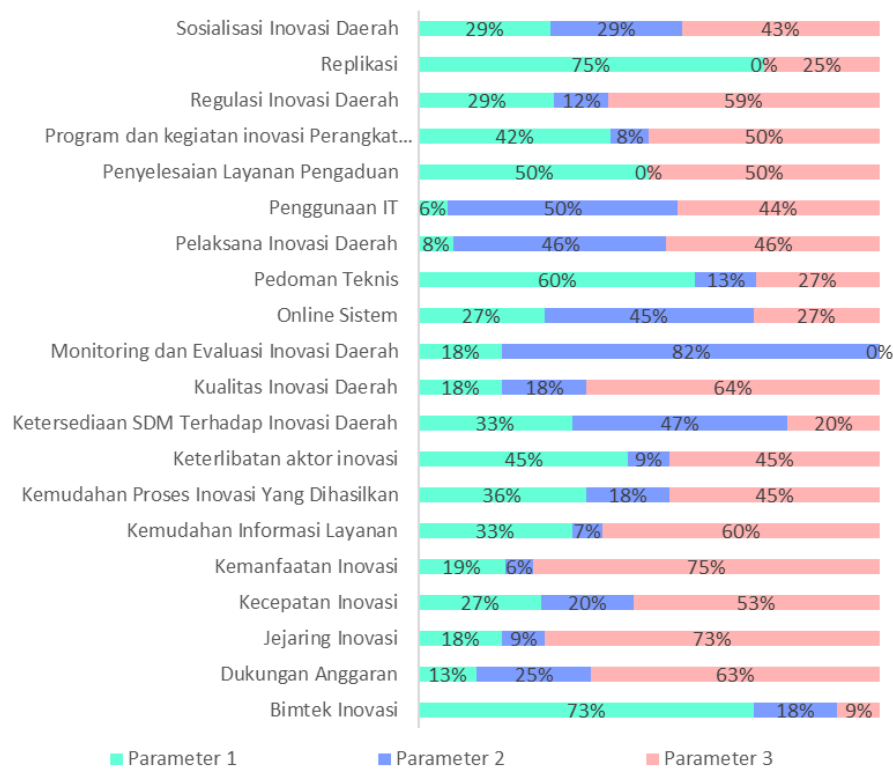


Gambar 65 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sarolangun

Dari 11 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sarolangun, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 39,29% sedangkan 60,71% lainnya telah terisi data pendukung. Tidak ada Indikator yang terisi penuh 100%, indikator dengan tingkat keterisian tertinggi adalah indikator regulasi inovasi daerah dengan tingkat keterisian 81%.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 18% artinya hanya 18% inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 66 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Jejaring Inovasi sebesar 73%, artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 82% artinya 82% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 73% artinya sebagian besar inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Regulasi.

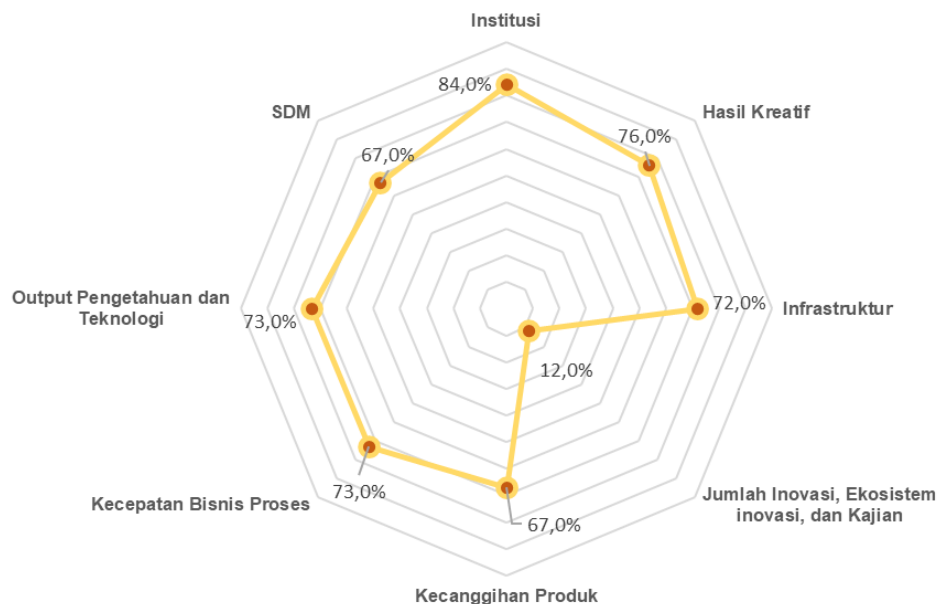
j. Daftar Inovasi Kabupaten Sarolangun beserta Skor Kematangannya

Tabel 7 Daftar Inovasi Kabupaten Sarolangun beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)	114
Sistem Diklat Satu Pintu	102
Sistem Informasi Dan Manajemen Tenaga Honorer (SIMHON)	36
E-SAKIP	98
Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK)	14

Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Teknologi Informasi (IT) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan On-Line	37
SISTIM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)	108
COMPETENCY DEVELOPMENT SYSTEM (C-DESY)	87
Bank Sampah	0
Pembinaan Terpadu Kampung KB	73
BENDUNGAN (DAM) SUNGAI BATANG ASAI	26
PENDIDIKAN BUDAYA SAROLANGUN DAN ANTI NARKOBA	55
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)	0
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	88
Pembuatan Kartu Pendaftaran Pencari Kerja	92
Pelayanan Terintegrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	51
Taman Bermain Anak - Anak	2
Online Single Submission (OSS)	106
Kegiatan Budikdamber Bagi Masyarakat Miskin terdampak Covid-19	57
SiMAYA	101
Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	66

G. KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

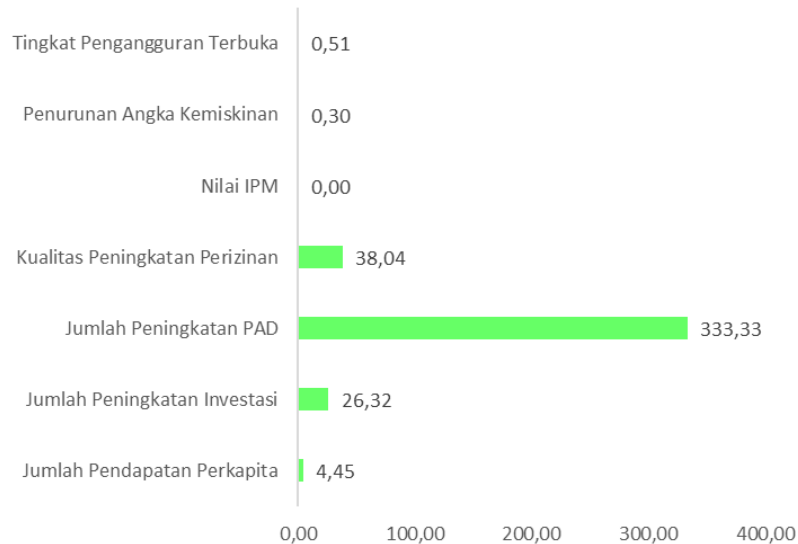


Gambar 67 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 84.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3).

Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 12.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah

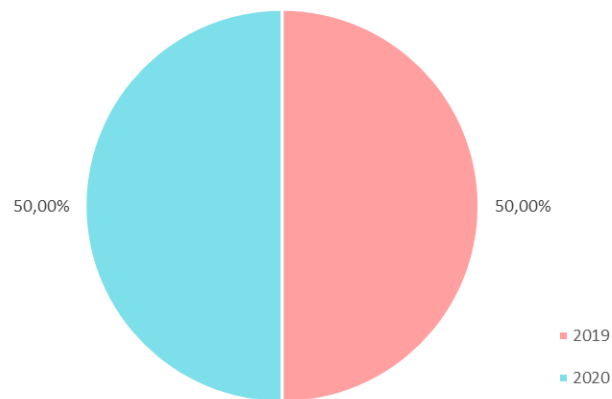


Gambar 68 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya perbaikan pada 7 indikator. Pertama perbaikan pada Tingkat pengangguran terbuka yang turun sebesar 0,51%, nilai tersebut lebih baik dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0,92%. Kedua, indikator Angka Kemiskinan yang juga mengalami penurunan sebesar 0,30% yang mana sudah berada di atas standar nasional parameter indeks inovasi daerah, turun 0,02%. Ketiga, indikator Nilai IPM yang tidak mengalami penurunan maupun kenaikan sama seperti standar nasional parameter indeks inovasi. Kemudian, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan yang naik sebesar 38,04%. Jika dibandingkan dengan standar nasional parameter yang naik sebesar 5%, nilai tersebut telah jauh melampaui. Selanjutnya, Jumlah Peningkatan PAD yang naik sebesar 333,33%, jauh lebih tinggi dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%. Indikator Jumlah Peningkatan Investasi juga mengalami kenaikan sebesar 26,32%, di mana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami kenaikan sebesar 4,45% lebih tinggi dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

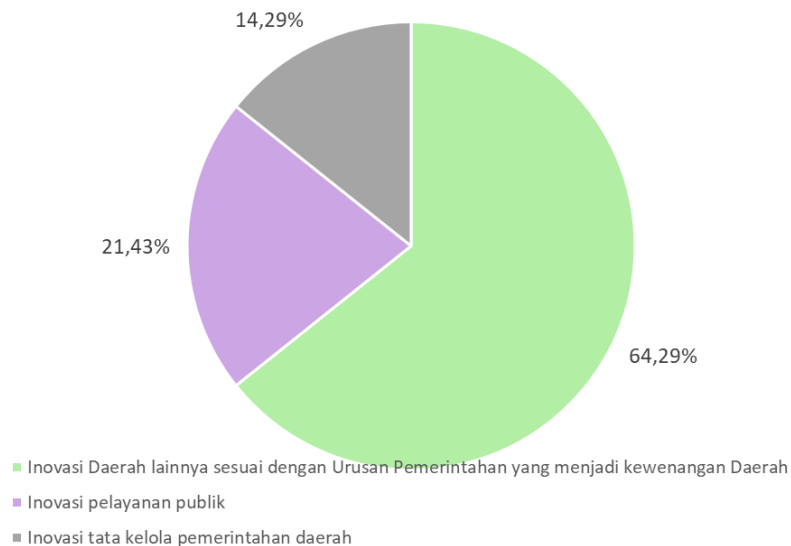
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 69 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, jumlah inovasi yang mulai diterapkan di tahun 2020 dan 2019 sama. Pada tahun 2020 dan 2019, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai menerapkan 7 inovasi pada masing-masing tahun.

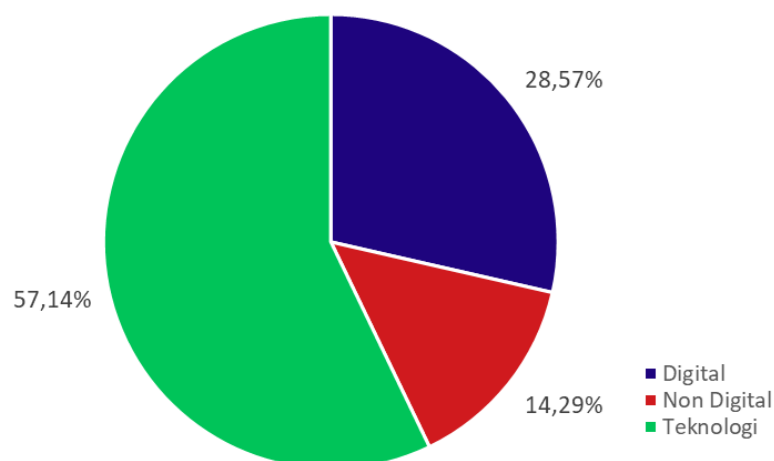
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 70 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi bentuk lainnya dengan 9 inovasi (64,29%). Kemudian bentuk pelayanan publik sejumlah 3 inovasi (21,43%) dan 2 inovasi (14,29%) lainnya adalah inovasi tata kelola pemerintahan.

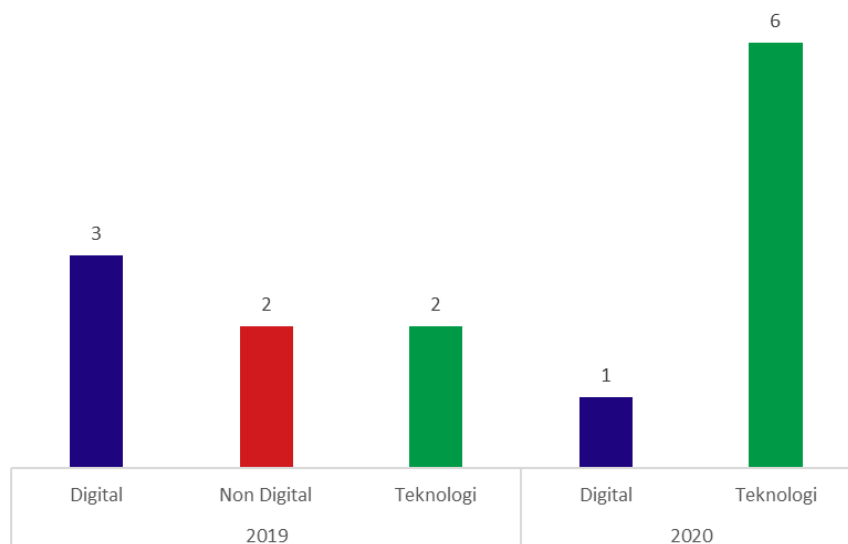
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 71 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 8 (57,15%) dari 14 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan inovasi teknologi, kemudian 4 inovasi (28,57%) merupakan inovasi digital dan 2 (14,29%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

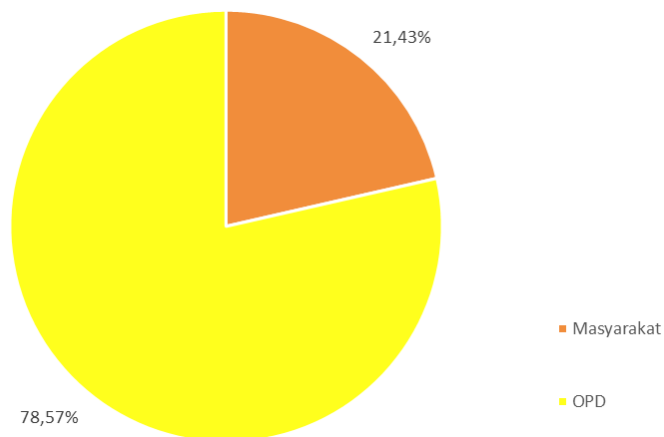


Gambar 72 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Terdapat kenaikan dan penurunan jumlah inovasi baru yang diterapkan berdasarkan jenis dan tahun penerapan inovasi di Kabupaten Tanjung Lebong Barat. Inovasi teknologi yang mulai diterapkan di tahun 2020 naik sebanyak 4 inovasi teknologi. Untuk inovasi non digital, ada 2 inovasi yang mulai diterapkan di tahun 2019 sementara di tahun 2020 tidak

ada inovasi baru yang mulai diterapkan. Terakhir inovasi digital, pada tahun 2019 terdapat 2019 inovasi baru yang mulai diterapkan dan di tahun 2020 terdapat 1 inovasi baru yang mulai diterapkan.

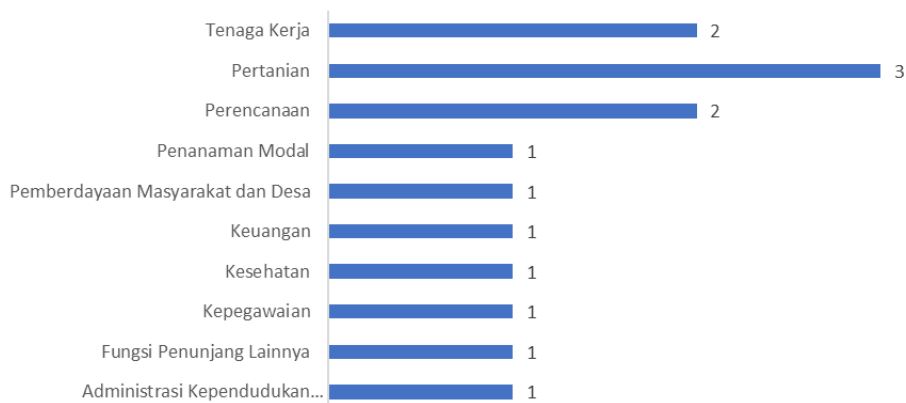
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 73 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 11 (78,57%) inovasi sementara 3 (21,43%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah dan Anggota DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

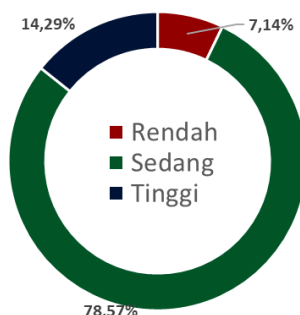


Gambar 74 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Pertanian dengan 3 inovasi kemudian 2 inovasi dari Tenaga Kerja dan Perencanaan, serta masing-masing 1 inovasi merupakan urusan Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keuangan, Kesehatan, Kepegawaian dan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Fungsi Penunjang Lainnya. Dari 6 urusan wajib, terdapat urusan yang telah diterapkan inovasi yaitu pada urusan kesehatan dengan 1 inovasi.

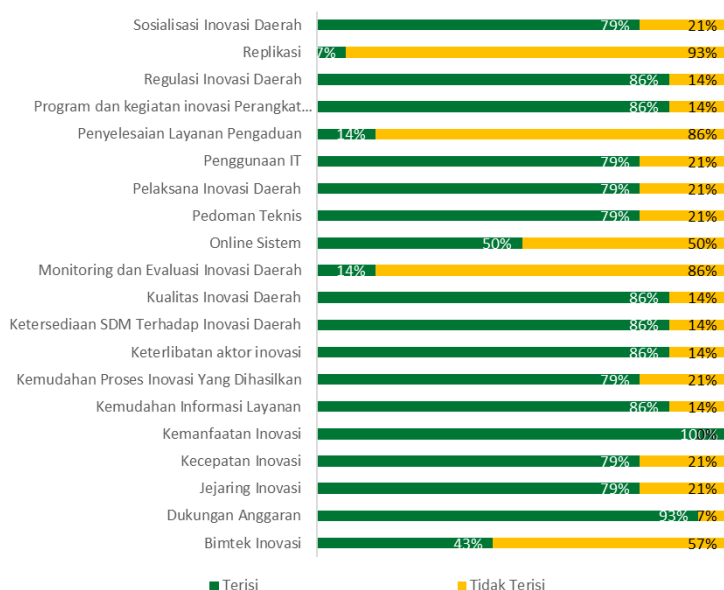
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 75 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan sedang, dimana terdapat 11 (78,57%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Kemudian terdapat 2 (14,29%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi dan 1 (7,14%) inovasi lainnya mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

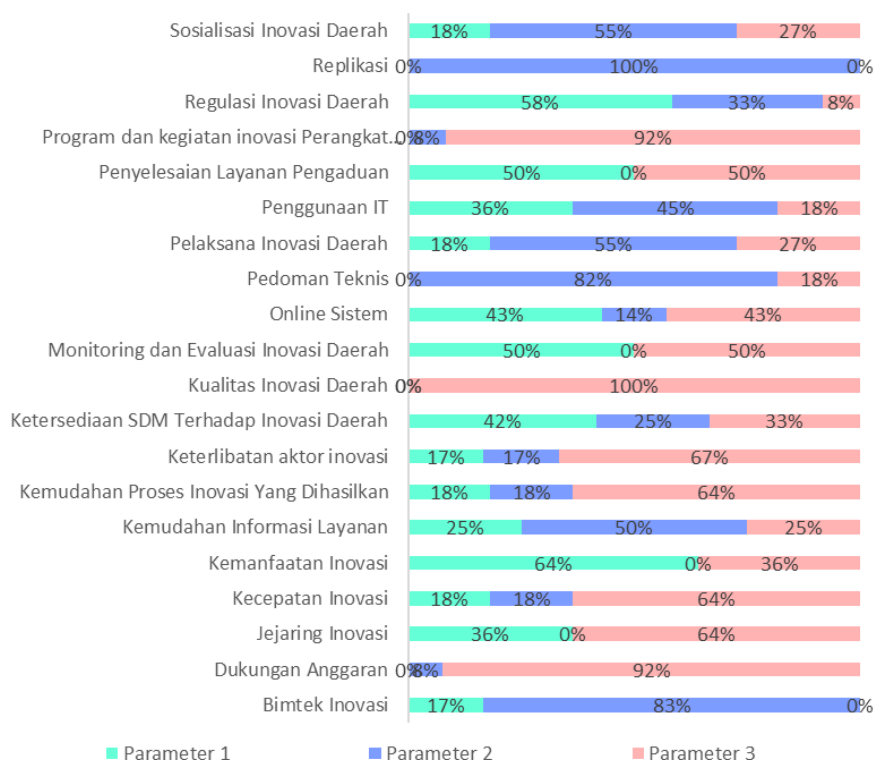


Gambar 76 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dari 11 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 30,71% sedangkan 69,29% lainnya telah terisi data pendukung. Ada indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu Kemanfaatan Inovasi. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 7% artinya hanya 7% inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 77 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

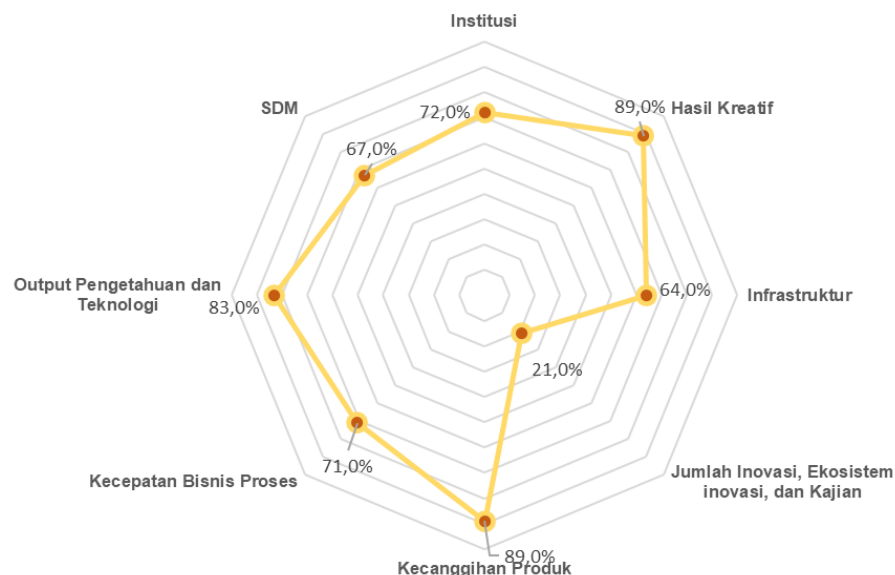
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Kemanfaatan Inovasi sebesar 64% artinya sebagian besar inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Skor Kematangannya

Tabel 8 Daftar Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Aplikasi e-musrenbang / e-PLANNING	119
Layanan Satu Berkas Menjadi Dua Dokumen (Sajada)	33
Gerakan Indonesia Sadar Administrasi	69
Inovasi TPP	62
Inovasi Kultur jaringan tanaman	79
Financial Office System (FOS) (Digitalizing, Storage and Retriving)	73
PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PEMBATIK MOTIF KHAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	63
PUKUK ORGANIC CAIR (POC)	82
PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENGANYAM PANDAN KHAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	71
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)	93
BUDIKSDAMBER DENGAN RED WATER SYSTEM	91
Instalasi Hidroponik dari Bambu dengan Panel Surya	87
Piring Upih Pelepah Pinang	93
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	111

H. KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Gambar 78 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif dan Kecanggihan Produk, yaitu 89.0%.

Artinya secara umum indikator - indikator pada kedua variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 21.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 79 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

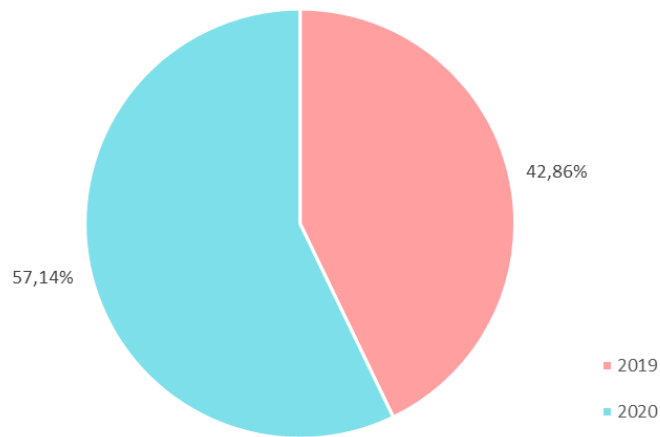
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 99,89% cukup rendah jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah tahun 2022 yaitu naik 8%.

Sebaliknya, enam indikator lain mengalami perbaikan. Pertama, indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang mengalami penurunan sebesar 0,14%. Angka tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Kedua, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0.84%, angka tersebut lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.6% dimana nilai tersebut masih sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 327,34%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 36,70% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 43,04% yang

mana nilai ini jauh lebih rendah dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

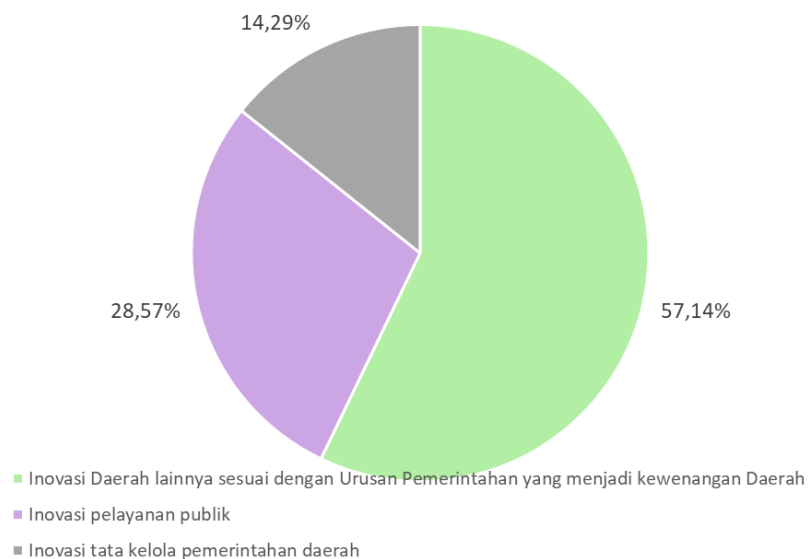
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 80 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 4 (57,14%) inovasi dari 7 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 3 (42,86%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

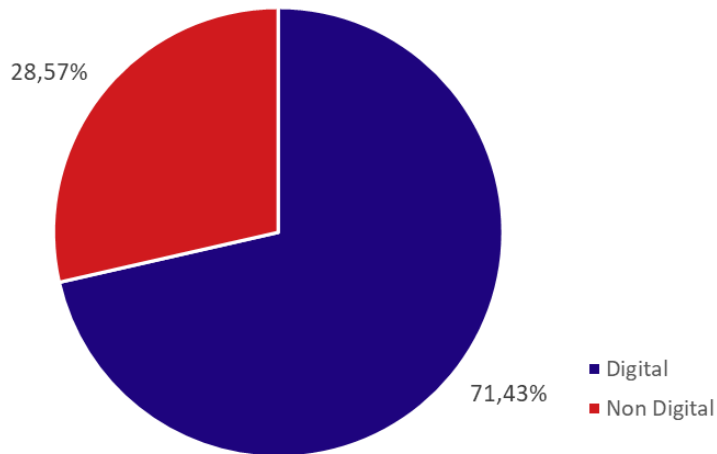
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 81 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi bentuk lainnya sejumlah 4 (57,14%) inovasi, 2 (28,57%) inovasi merupakan inovasi pelayanan publik dan 1 (14,29%) inovasi lainnya adalah inovasi tata kelola pemerintahan.

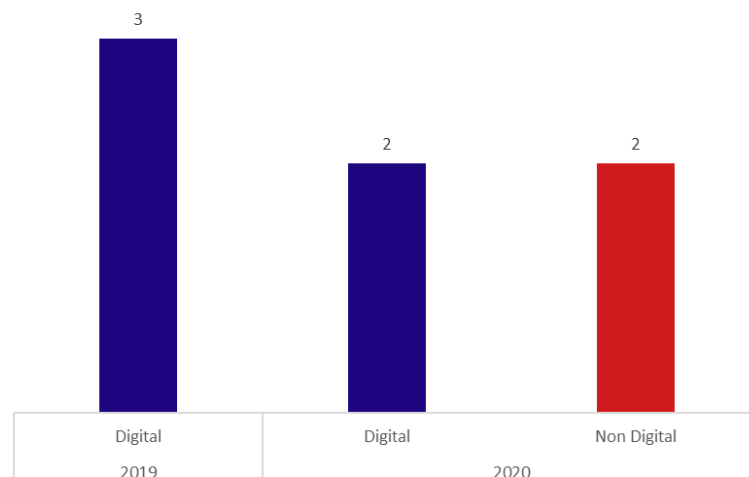
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 82 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 5 (71,43%) dari 7 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan inovasi digital dan 2 (28,57%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

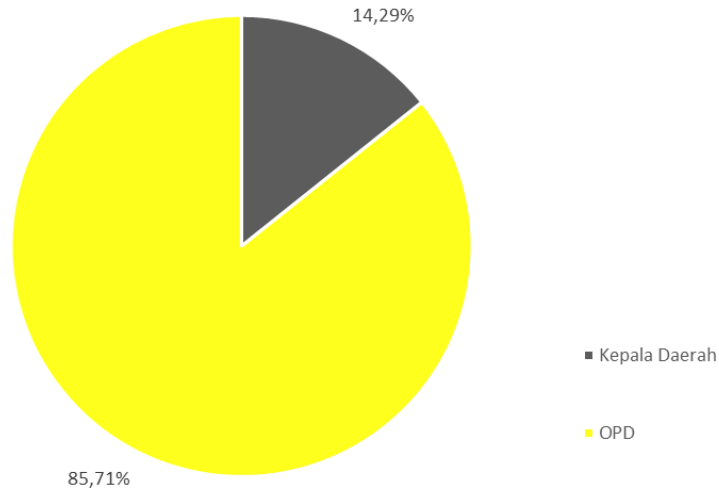


Gambar 1. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Secara keseluruhan, terdapat kenaikan jumlah inovasi yang mulai diterapkan di tahun 2019 dan 2020. Inovasi digital baru yang diterapkan di tahun 2019 berjumlah 3 inovasi, jumlah

ini lebih tinggi jika dibandingkan jumlah inovasi digital baru yang ditetapkan di tahun 2020 sejumlah 2 inovasi. Berbanding terbalik dengan inovasi non digital di mana di tahun 2020 terdapat 2 inovasi baru yang ditahun sebelumnya belum ada inovasi baru yang diterapkan.

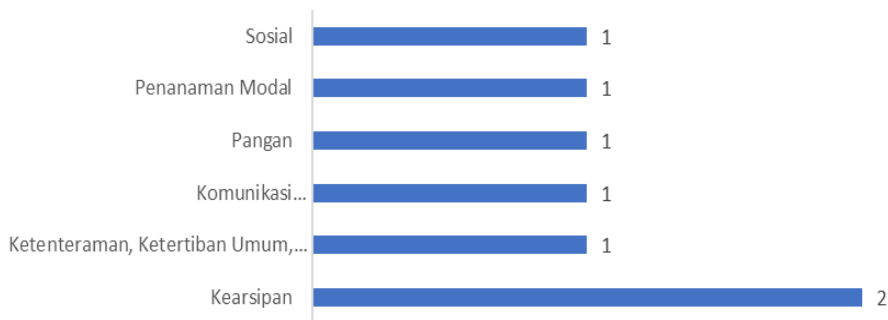
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 83 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 6 (85,71%) inovasi sementara 1 (27,27%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Anggota DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

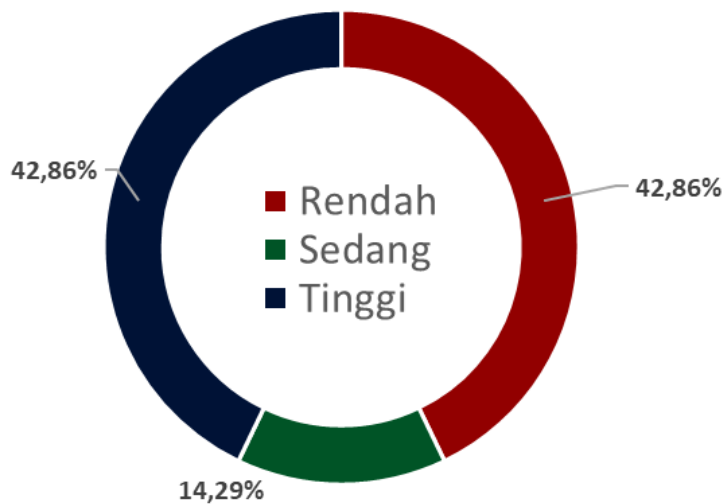


Gambar 84 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Kearsipan dengan 2 inovasi kemudian masing-masing 1 inovasi merupakan inovasi dalam urusan Sosial, Penanaman Model, Pangan, Komunikasi, dan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya

terdapat 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Sosial dengan 1 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

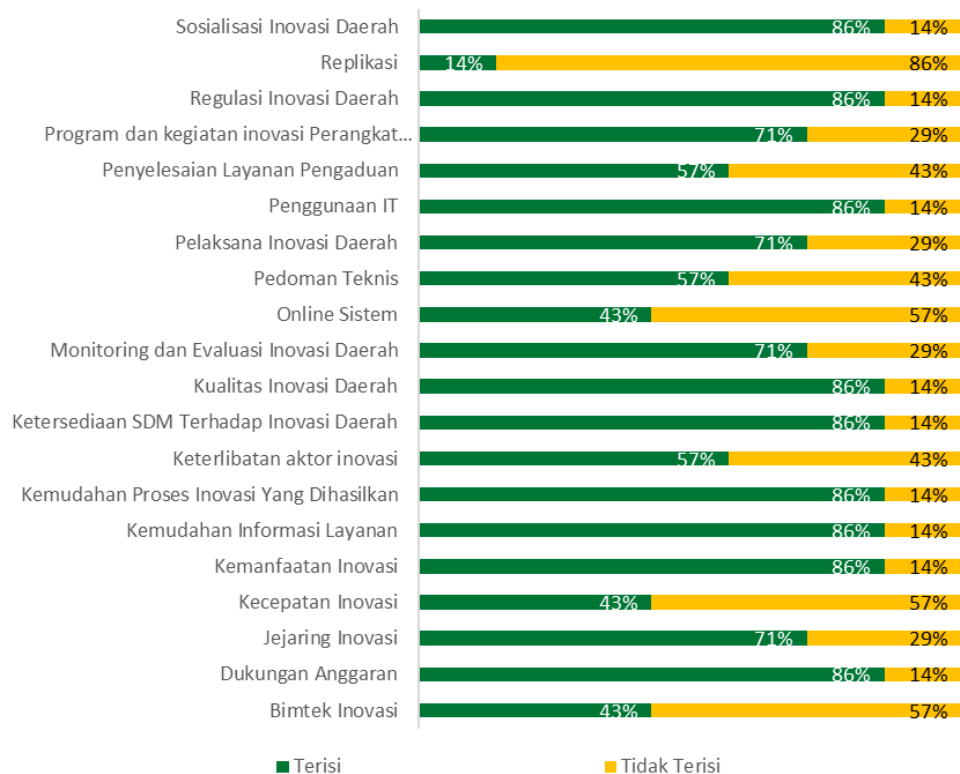
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 85 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan rendah, dimana terdapat 3 (42,86%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Kemudian terdapat 3 (42,86%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi dan 1 (14,29%) inovasi lainnya mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

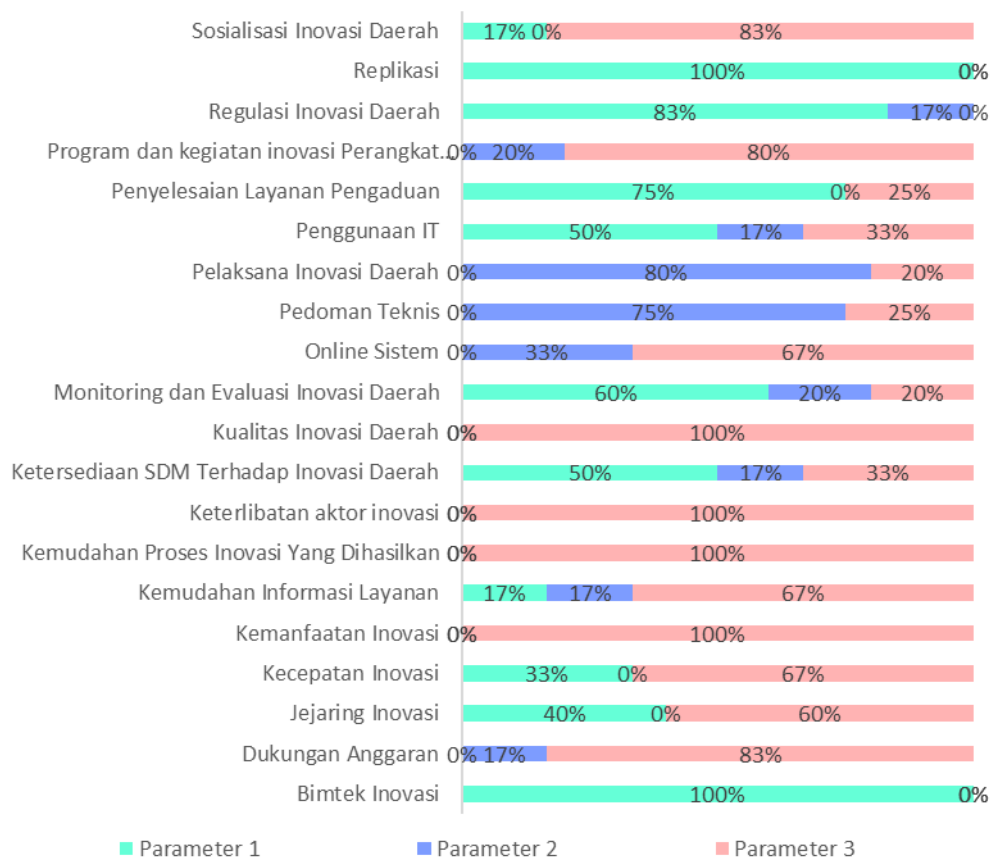


Gambar 86 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari 7 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 31,43% sedangkan 68,57% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian tertinggi 86%, yaitu: Indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Regulasi Inovasi Daerah, Penggunaan IT, Kualitas Inovasi, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, dan Dukungan Anggaran. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 14% artinya baru sedikit inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 87 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

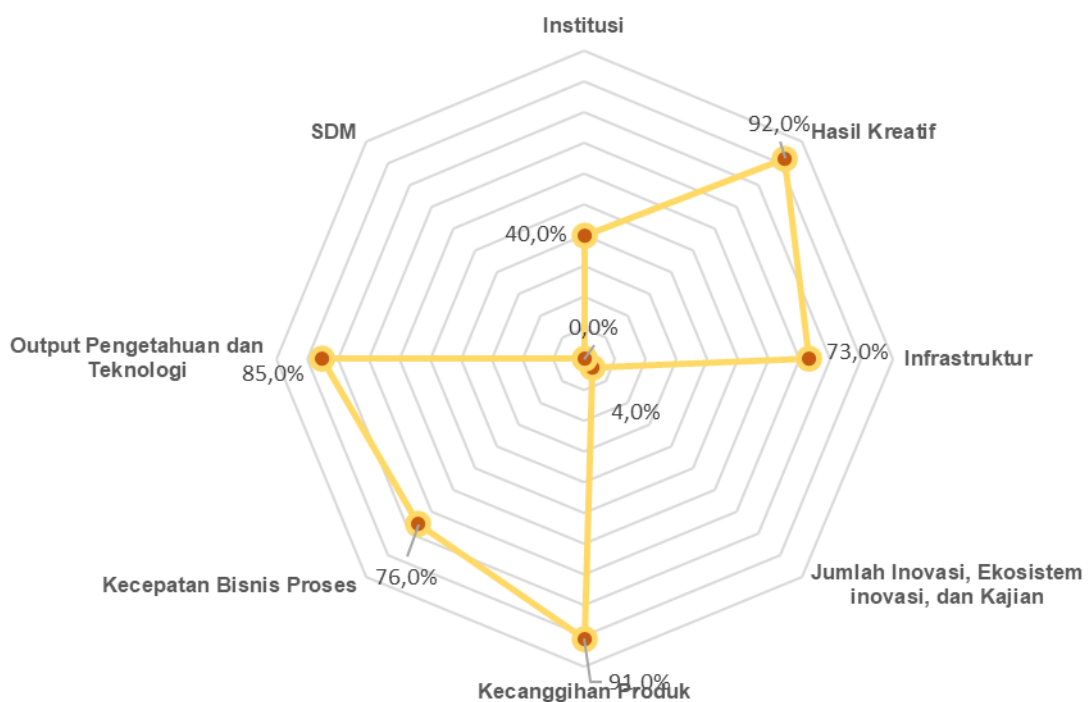
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemanfaatan Inovasi sebesar 100%, artinya seluruh besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 80% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan Bimtek Inovasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Regulasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta Skor Kematangannya

Tabel 9 Daftar Inovasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Masyarakat Sehat Bebas Covid-19	21
Beras ASN	105
Sistem Arsip Dokumen (SADU)/Penyimpanan Data Online	95
Buku Tamu Online	24
Portal Sabak Smart Center (SSC) Berbasis Android	102
Pelayanan Pengaduan Bantuan Sosial	0
Pemanfaatan Sistem Informasi Layar Sentuh Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur	108

I. KABUPATEN TEBO

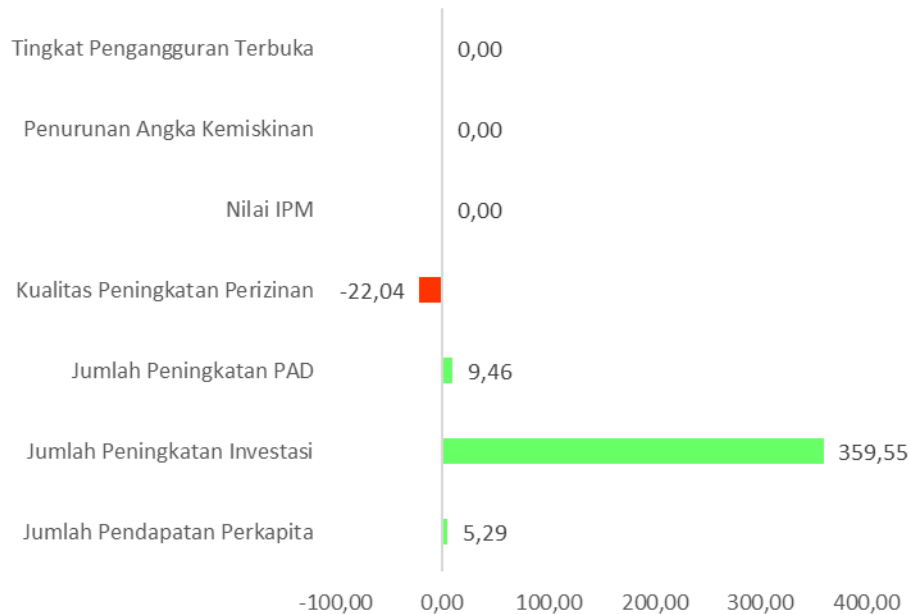


Gambar 88 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tebo

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Tebo memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 92.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Sumber Daya Manusia sangat rendah rendah, yaitu 0.0% dimana artinya tidak

ada indikator dalam variabel tersebut yang telah terisi pada pelaporan indeks inovasi daerah tahun 2021.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 89 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tebo

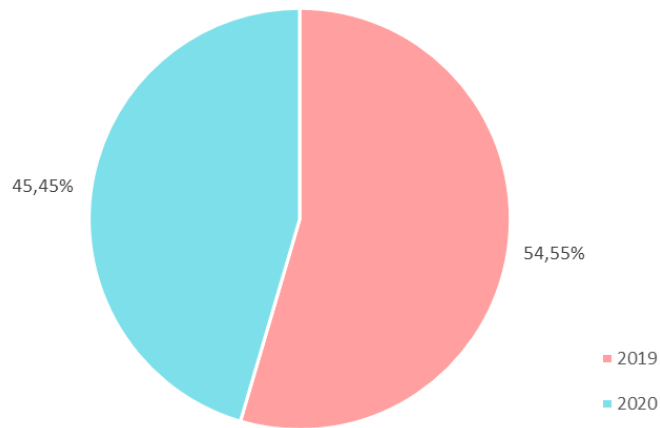
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tebo telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Kualitas Peningkatan Perizinan yang mengalami penurunan sebesar 22,04%, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

Sebaliknya, lima indikator lain menunjukkan perbaikan atau bernilai tetap dari tahun 2019. Pertama, indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang masih tetap dibanding tahun sebelumnya. Angka tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Kedua, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga tidak mengalami perubahan pada tahun 2020 dari tahun 2019, kondisi tersebut tidak lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia juga tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, kondisi tersebut masih sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 359,55% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Kemudian, indikator jumlah Pendapatan Perkapita juga mengalami kenaikan sebesar 5,29% yang mana lebih tinggi dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah tahun 2020 yaitu turun sebesar 1,85%. Terakhir,

indikator Peningkatan PAD pada Kabupaten Tebo menunjukkan kenaikan sebesar 9,48%, yang lebih tinggi dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

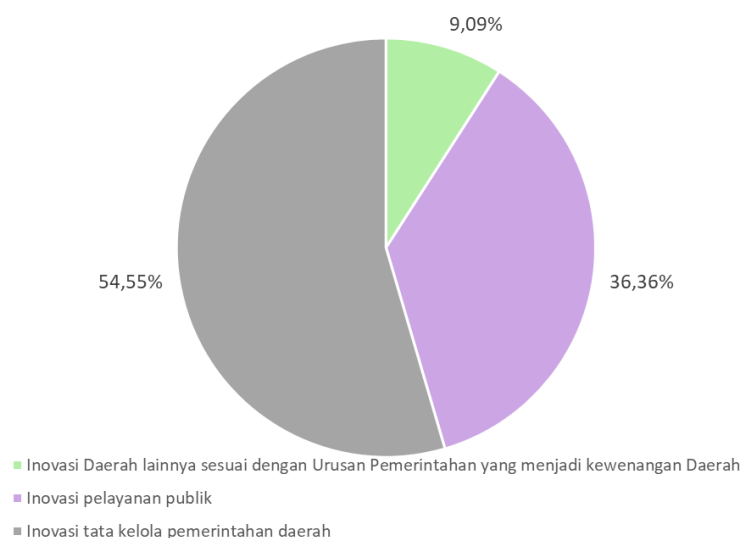
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 90 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tebo

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tebo telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 6 (54,55%) inovasi dari 11 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 5 (45,45%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

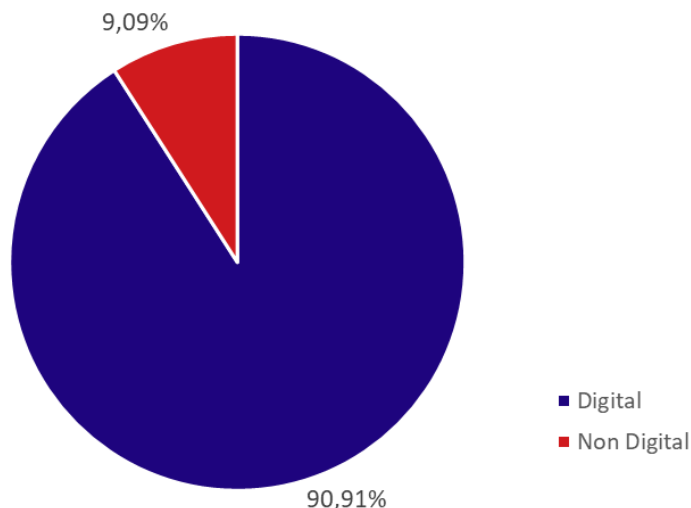


Gambar 91 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tebo

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tebo, yaitu inovasi pelayanan public, inovasi tata kelola pemerintahan daerah

dan inovasi bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi tata kelola pemerintahan sejumlah 6 (54,55%) inovasi dan 4 (36,36%) inovasi merupakan inovasi pelayanan publik, dan 1 inovasi lainnya adalah inovasi bentuk lainnya.

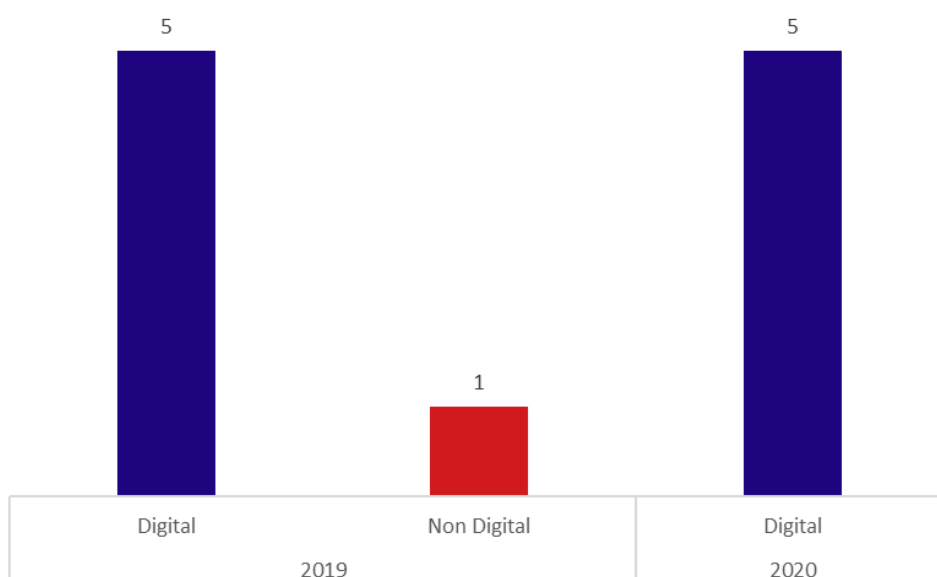
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 92 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tebo

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 10 (90,91%) dari 10 inovasi daerah yang dilaporkan Kabupaten Tebo merupakan inovasi digital dan 1 (9.09%) inovasi lainnya merupakan inovasi non-digital.

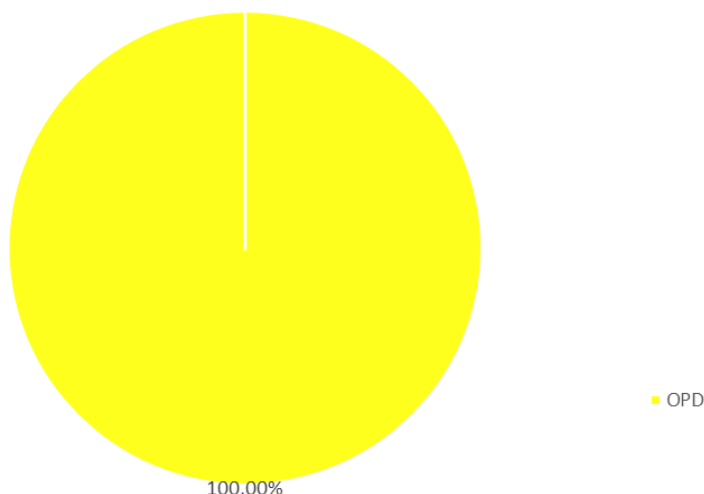
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 93 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tebo

Tidak terdapat kenaikan jumlah inovasi digital yang mulai diterapkan pada tahun 2020 dibanding 2019. Pada kedua tahun tersebut, Kabupaten Tebo mulai menerapkan masing-masing 5 inovasi daerah. Sementara untuk inovasi non-digital, inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 lebih banyak dibanding inovasi baru yang diterapkan pada tahun 2020.

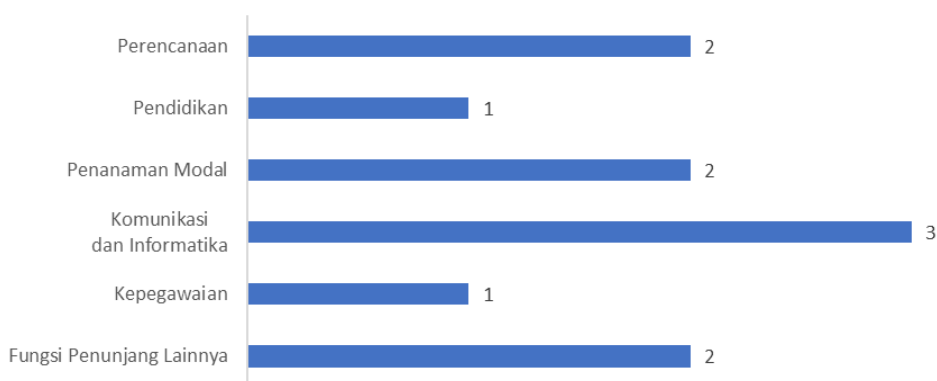
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 94 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tebo

Seluruh inovasi yang dilaporkan pada indeks inovasi daerah tahun 2021 diinisiatif oleh Perangkat Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah, dan Anggota DPRD serta Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

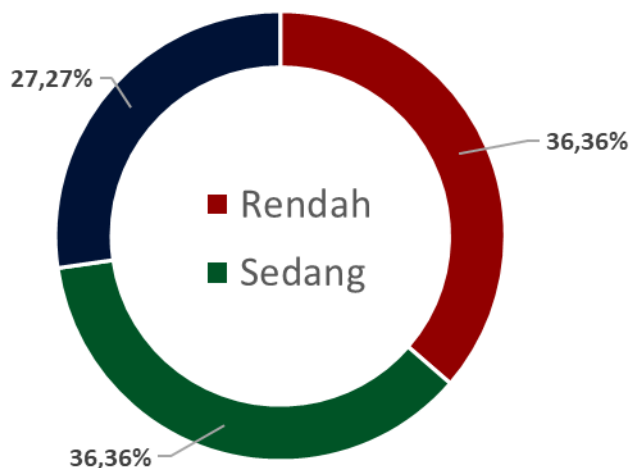


Gambar 95 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tebo

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Tebo berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Komunikasi dan Informatika dengan 3 inovasi kemudian masing-masing 2 inovasi dari urusan Perencanaan, Penanaman Modal, dan Fungsi Penunjang Lainnya dan masing-masing 1 inovasi merupakan urusan Pendidikan dan Kepegawaian. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat 1 dari

6 urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Pendidikan dengan 1 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum terlaporkan.

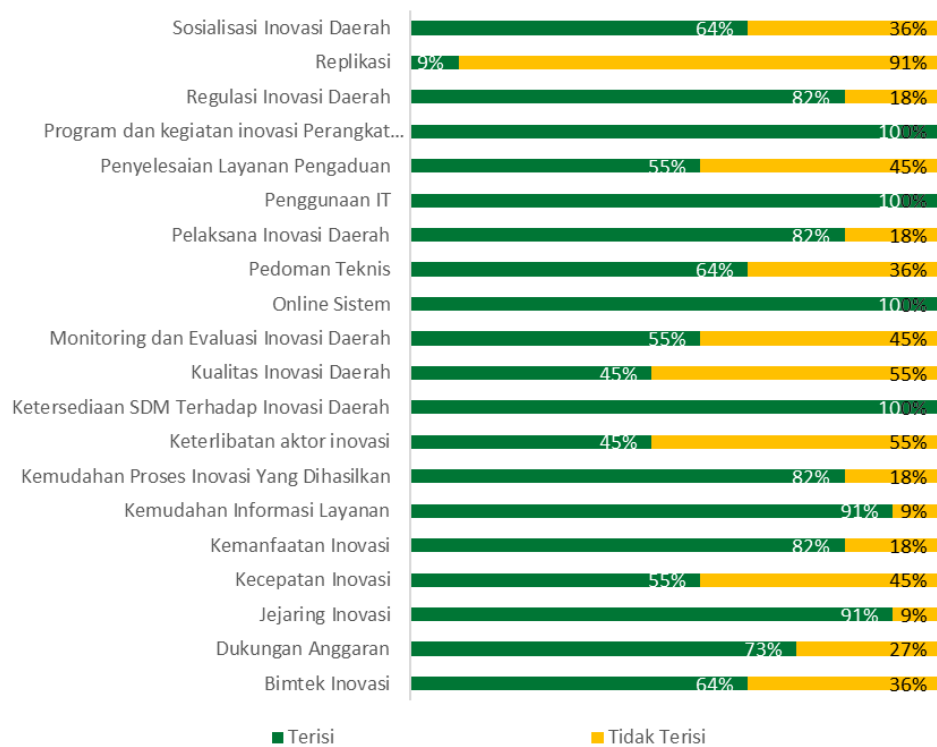
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 96 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tebo

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan rendah dan sedang, dimana terdapat masing-masing 4 (36,36%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah dan sedang. Kemudian terdapat 3 (27,27%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

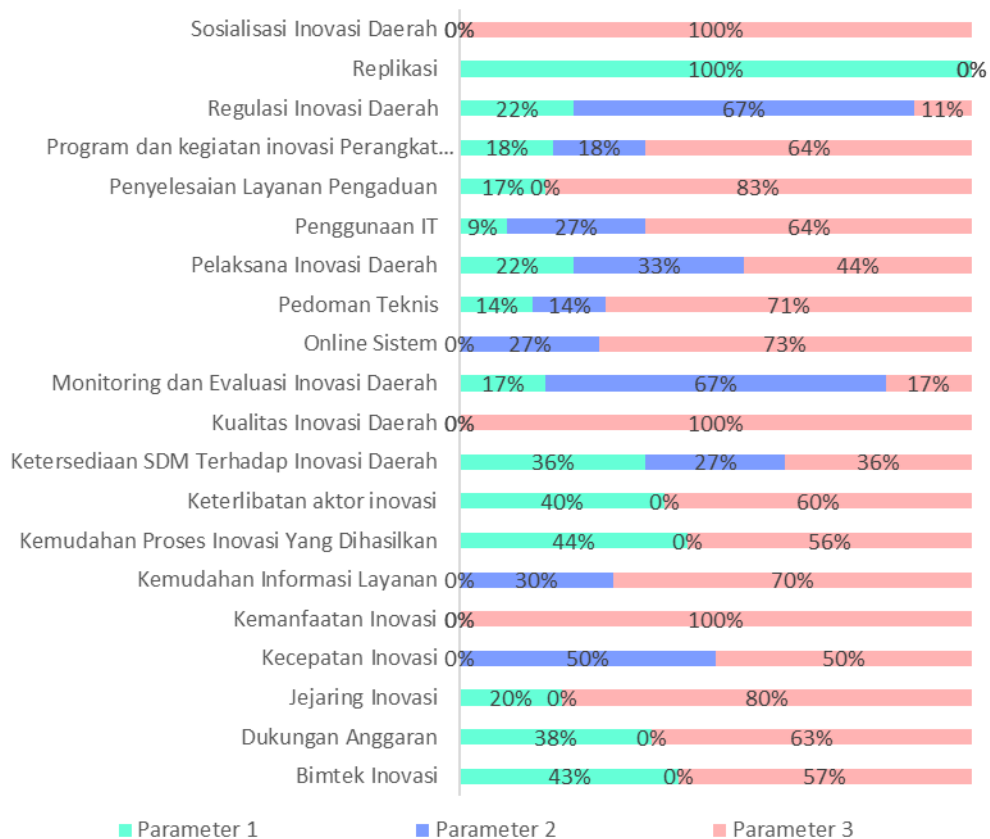


Gambar 97 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tebo

Dari 11 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tebo, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 28,18% sedangkan 71,82% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu: Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Online Sistem, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, dan Penggunaan IT. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tebo telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 9% artinya hanya beberapa inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 98 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

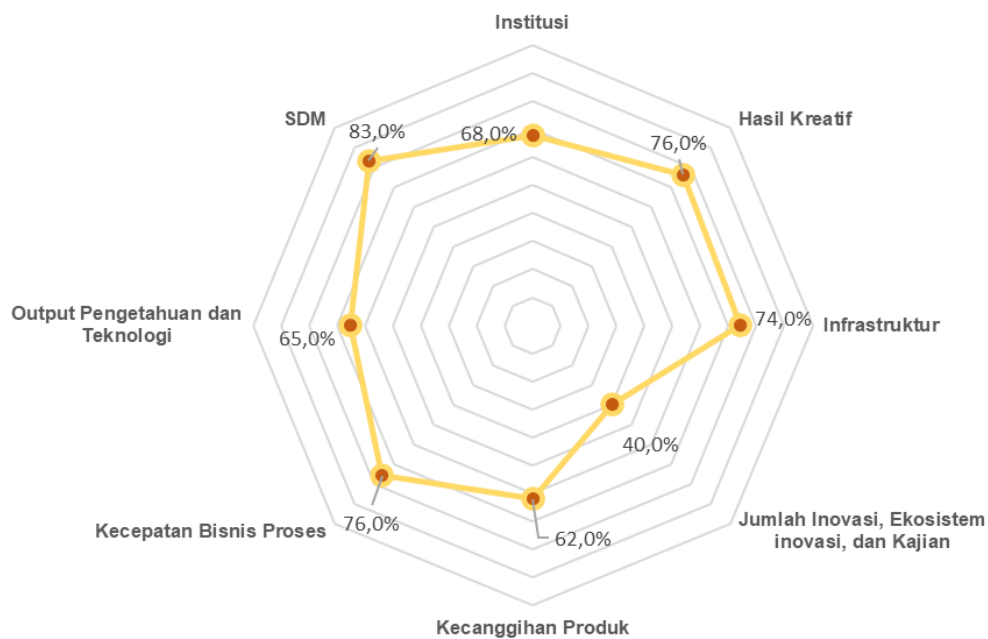
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Sosialisasi Inovasi Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah dan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 67% artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Tebo beserta Skor Kematangannya

Tabel 10 Daftar Inovasi Kabupaten Tebo beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor PTSP	27
Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai Muatan lokal untuk jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Tebo	95
Sicantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik)	52
Aplikasi e-Sakip	66
PENERAPAN APLIKASI E-PRESENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO	115
SKP Online Kabupaten Tebo	113
Aplikasi e-Office	66
TEBO MOBILE	28
e-planning kabupaten tebo	34
DESA DIGITAL TELUK RENDAH ULU	20
Simpatda	114

J. KOTA JAMBI



Gambar 99 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Jambi

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Jambi memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian

masih cukup rendah, yaitu 40.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



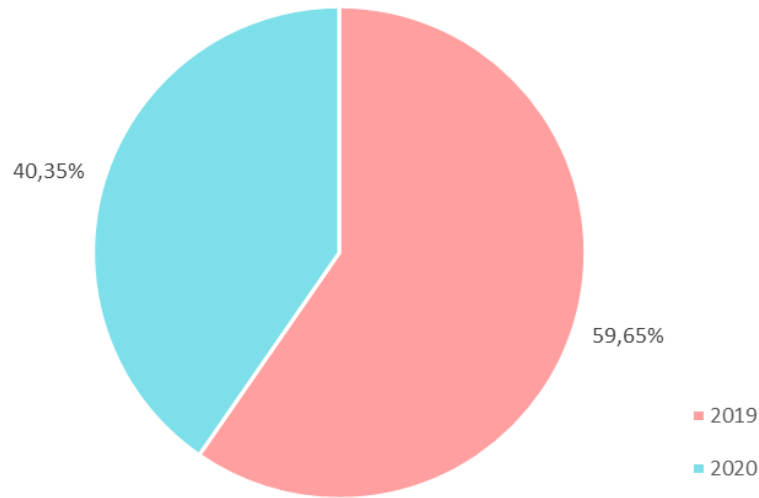
Gambar 100 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Jambi

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Jambi telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.15%, angka tersebut lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%.

Sebaliknya, enam indikator lain mengalami perbaikan. Pertama, indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang mengalami penurunan sebesar 2,18%. Angka tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.03% dimana nilai tersebut masih sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 0,24%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 232,12% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Indikator Peningkatan PAD pada Kota Jambi menunjukkan kenaikan sebesar 11778,47%, yang jauh lebih tinggi dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami penurunan sebesar 6,92% yang mana nilai ini jauh lebih rendah dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 1,85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

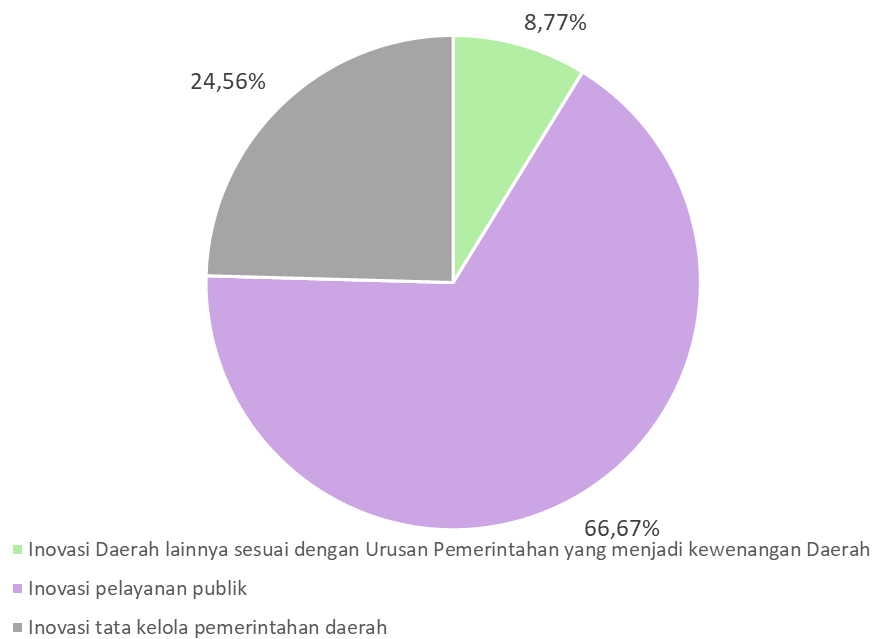
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 101 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Jambi

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Jambi telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 34 (59,65%) inovasi dari 57 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 23 (40,35%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

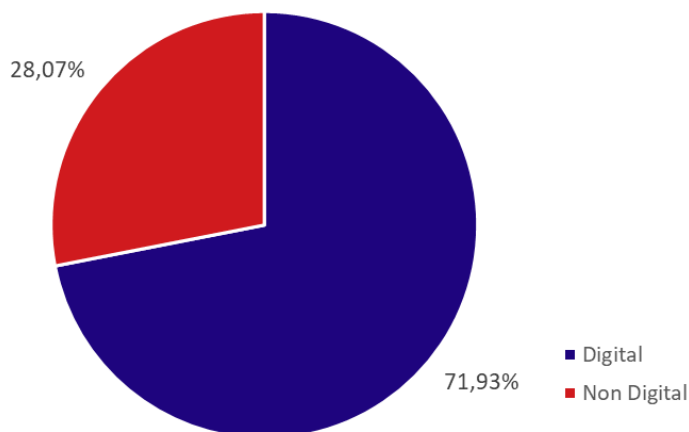
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 102 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Jambi

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Jambi, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah bentuk lainnya. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 38 (66,67%) inovasi dan 14 (24,56%) merupakan inovasi tata kelola pemerintahan, serta 5 inovasi lainnya adalah inovasi daerah bentuk lainnya.

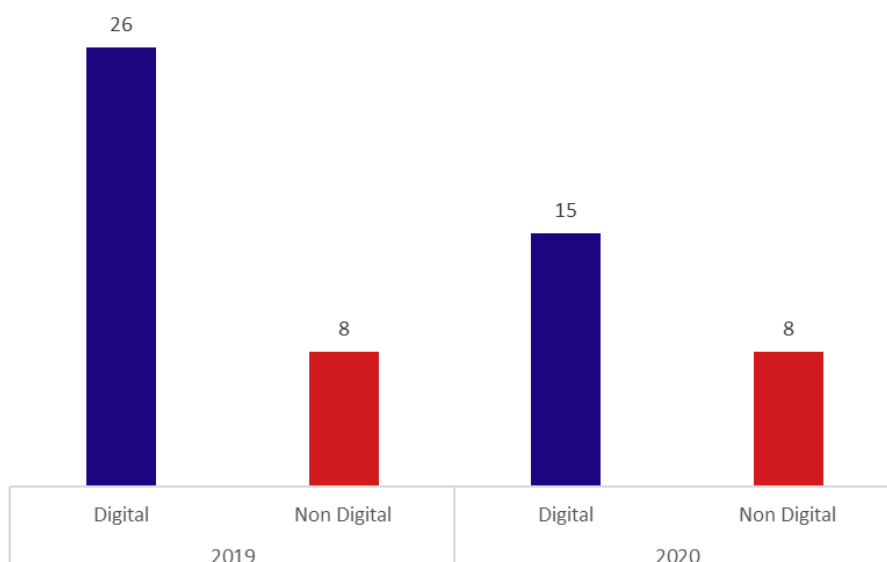
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 103 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Jambi

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 41 (71,93%) dari 57 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Jambi merupakan inovasi digital dan 16 (28,07%) inovasi lainnya merupakan inovasi non-digital.

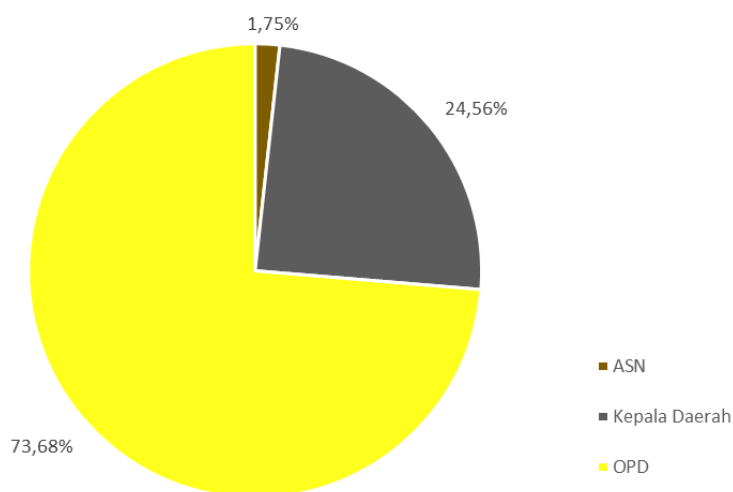
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 104 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Jambi

Terdapat penurunan jumlah inovasi baru yang diterapkan di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Inovasi digital menurun dari 26 inovasi menjadi 15 inovasi baru yang diterapkan. Sementara untuk inovasi non digital jumlah inovasi baru yang diterapkan di tahun 2019 dan 2020 berjumlah sama yaitu 8.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 105 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Jambi

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Jambi pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, yaitu sejumlah 42 (73,68%) inovasi sementara 14 (24,56%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah, kemudian 1 (1,75%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

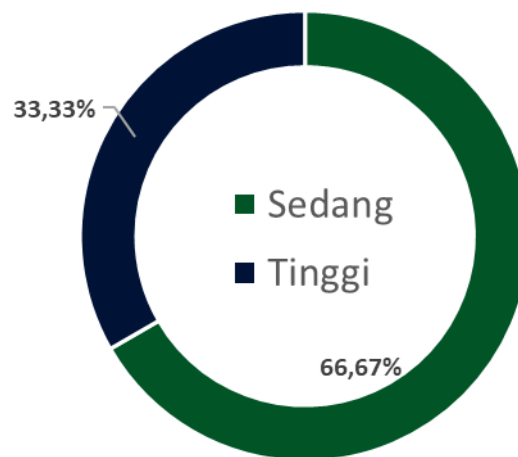
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 106 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Jambi

Sebaran inovasi daerah pada Kota Jambi berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 11 inovasi. Urusan dengan jumlah inovasi terbanyak kedua adalah urusan lingkungan hidup dengan 8 inovasi. Ketiga urusan kesehatan dengan 7 inovasi. Keempat Kesehatan dengan 7 inovasi. Selanjutnya urusan Kepegawaian dengan 5 inovasi. Kemudian dengan masing-masing 4 inovasi dari urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Fungsi Penunjang Lainnya dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Urusan dengan masing-masing 3 urusan adalah Pendidikan dan Komunikasi dan Informasi. Urusan dengan 2 inovasi adalah Pemberdayaan Perempuan. Terakhir dengan masing-masing 1 inovasi adalah urusan Sosial, Perhubungan, Perencanaan, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Keuangan, dan Kebudayaan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, telah melingkupi 6 urusan wajib pelayanan dasar.

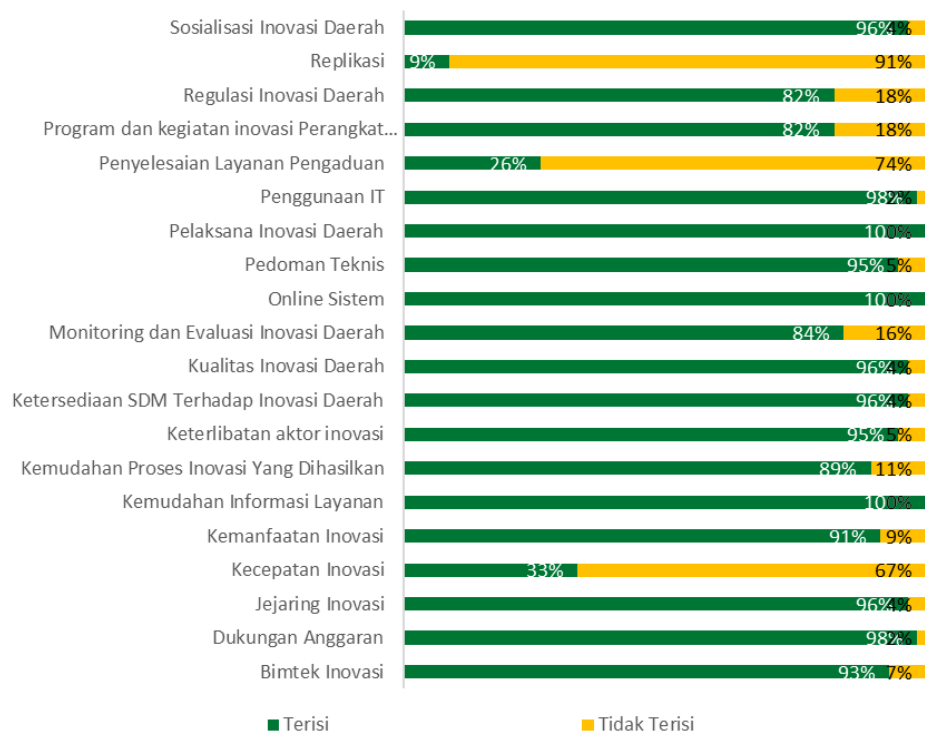
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 107 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Jambi

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi baru mencapai skor kematangan sedang, dimana terdapat 38 (66,67%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Kemudian terdapat 19 (33,33%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

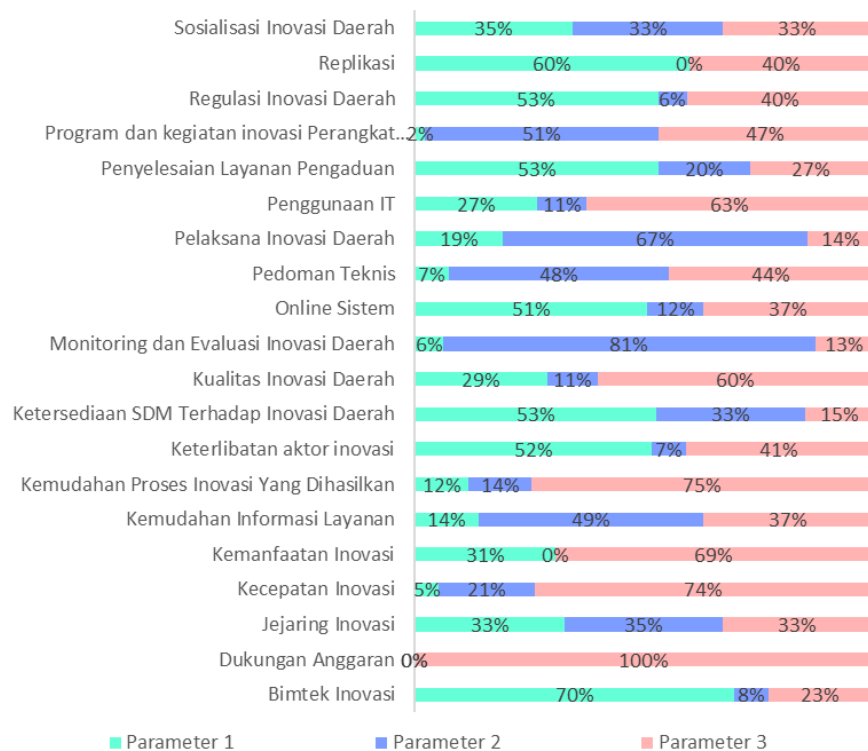


Gambar 108 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Jambi

Dari 57 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Jambi, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 16,84% sedangkan 83,16% lainnya telah terisi data pendukung. Ada beberapa indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu Pelaksana Inovasi. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Jambi telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 9% artinya hanya sebagian kecil inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 109 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran sebesar 100%, artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 87% artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi sebesar 70% artinya sebagian besar inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Regulasi.

j. Daftar Inovasi Kota Jambi beserta Skor Kematangannya

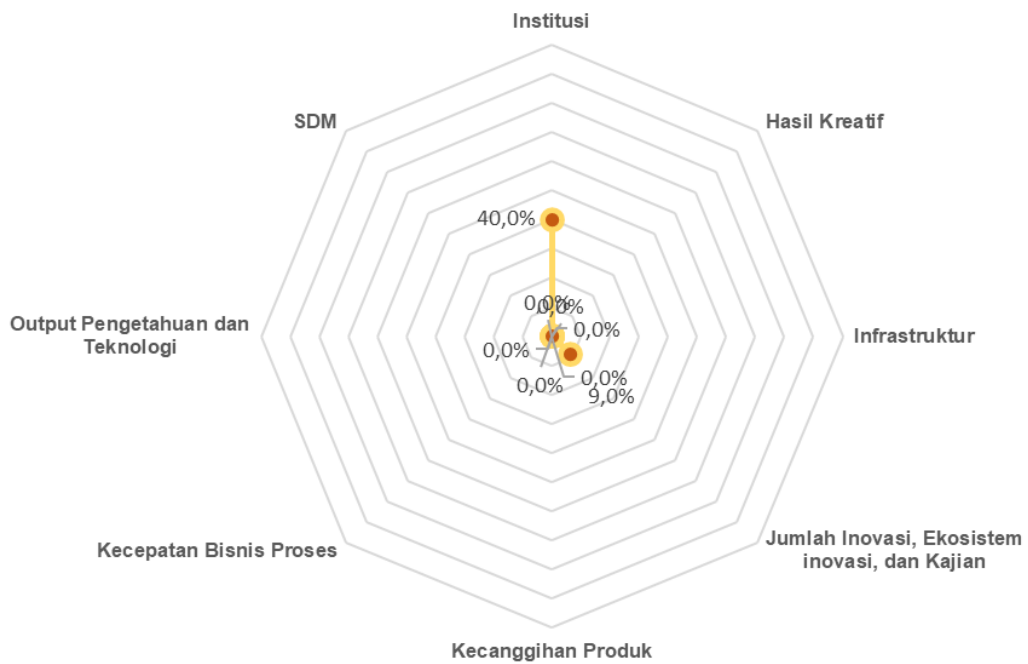
Tabel II Daftar Inovasi Kota Jambi beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
TULANG (KARTU PELANGGAN) LPG 3 KG DI KOTA JAMBI	114
Bantar (Bersih, Aman dan Pintar)	98
PELAYANAN "JETAR" (JEMPUT ANTAR)	86
JAMSEL CARE (JAMBI SELATAN BERBAGI)	80
JAMSEL SMART (Jambi Selatan Solid, Mapan, Aman, Religius dan Tertib)	82
JAMBI SELATAN SERVICE	85

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SILAT (SILAHTURAHMI APARAT DAN MASYARAKAT)	80
SIPATEN (Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan dan Kelurahan)	81
SIKOJA (Sistem Informasi Kota Jambi)	109
FIT AND PROPER TEST JABATAN CAMAT DAN LURAH	82
PORTAL UKPBJ	83
Penghargaan Manajemen Kepegawaian OPD Terbaik	80
SIPPOLING (Sistem Pelaporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Berbasis Elektronik)	101
ARGO KASAMBA (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GOTONG ROYONG SYSTEM ARISAN FORUM RT DI KASAMBA)	97
WTE Talang Banjar (Aset Waste to Energy) Kota Jambi	82
SPIDERMAN (Sarana Pelayanan Inovatif DEngan RaMah ANak)	91
SimpeAja (Sistem Pelayanan Antar Jemput Administrasi Kependudukan Disabilitas dan Jompo)	62
SIKO (Sistem inovasi Kota Jambi)	85
Capsule Bus Koja Trans	102
SIBABA (SISTEM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA)	97
SRIKANDI PAAL MERAH (Wanita Penjaga Keamanan Lingkungan di Kelurahan Paal Merah)	87
BANGKIT BERDAYA (Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu yang Berazaskan Swadaya Masyarakat)	124
KAJUT (Kampung Jamu Tambak Sari)	71
APLIKASI "RAMAH"	84
Pelayanan Administrasi Diklat Berbasis Online	71
(PEWISTON) Pengawasan Persampahan Berbasis Elektronik	108
GELISATOSIMA (GERAKAN PEDULI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT)	66
SIRAJA KOJA (Sistim Informasi Barang dan Jasa Kota Jambi)	108
Sebar Jasa (Sejahtera Bareng Jambi Selatan)	82
SIPADEK (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Perkantoran)	82
SILANCAR (Sistem Informasi Layanan Perizinan Aman, Nyaman, Cepat, Akurat Akuntabel, Resmi)	86
Kerjo Samo RT (Kelurahan Jelutung Berkantor Sampai Malam Bersama RT)	79
SANGCAKA (Sanggar Baca Kita)	64
REAKSI CEPAT (Rekam Data Adminduk Siap Cetak Selesai Di Tempat)	76
BESELO (BELAJAR SELOKO)	73
PAJA SIGAP (PEMUDA JAMBI SELATAN SIAP TANGGAP PEDULI)	90
Pakar Kasih (Padat Karya Tunai Kali Bersih)	104
iJambiKota	104
GMKG Talang Gulo (Gas Methan untuk Kompor Gas)	89
Pil Pakuan Sari Rapet (PSR)	91

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
RUKUN TETANGGA SAHABAT PAJAK (RT SAJA)	91
KLIK PAJAK KOTA JAMBI	108
SIKOMO (SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI OBSTETRI)	116
PITA MOLIN (PELAYANAN, INFORMASI DAN KONSULTASI DENGAN MOBIL PERLINDUNGAN) UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK KOTA JAMBI	83
KERIS SIGINJAI (Komunitas gErakan mengajaR menginspraSi kolaboraSI dengan teknoloGI uNtuk JAmbi terkini)	99
PASBERGASSS (PASAR BERSIH GANG SEMPIT DAN SUNGAI DARI SAMPAH)	98
KEMAS (KIA MENYAPA SEKOLAH)	101
SIKESAL 2 (Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online Versi 2)	127
BALAMBIKA (Bangkit Lembaga Adat Melayu Jambi Kota)	102
Pelayanan MATBUKEN (jum'MAT saBtU KEreN)	98
Pengawasan Persampahan Berbasis Elektronik (PEWISTON)	109
GOJAS (Pergi - Jemput Antar Surat)	81
GEBUG SI JAHAT (KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT AMANAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN AKSES JAMBAAN DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS PAKUAN BARU)	81
SIIT (Sistem Informasi Inventarisasi Tanaman)	116
PAKWO "PELAYANAN PELAPORAN AKTA KEMATIAN MELALUI APLIKASI WHATSAPP ONLINE" PADA DINAS DUKCAPIL KOTA JAMBI	107
ABOK (Absen Biometrik)	122
GERAKAN DIET PLASTIK KOTA JAMBI	120

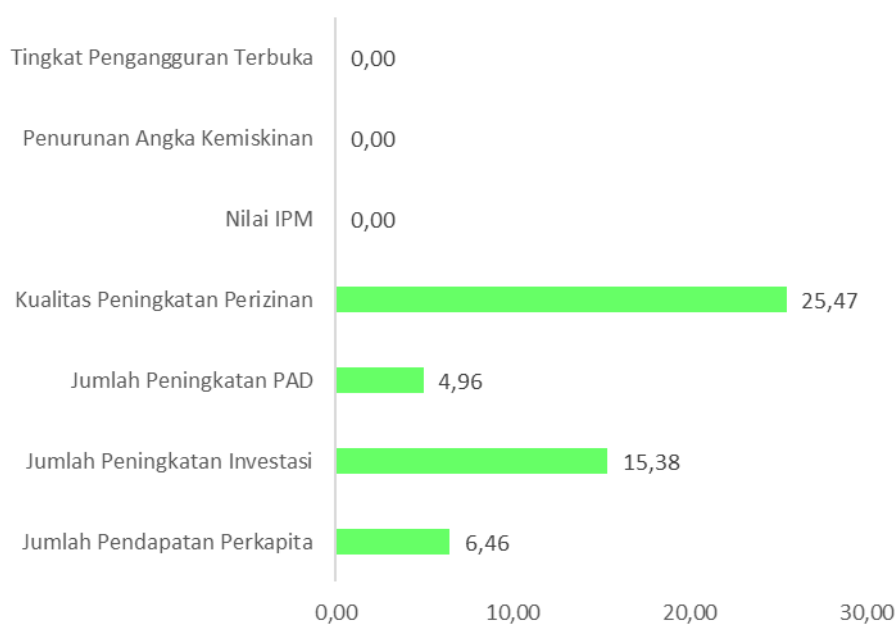
K. KOTA SUNGAI PENUH



Gambar 110 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Sungai Penuh

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, dari 8 variabel pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 hanya dua variabel yang terisi bukti dukung. Pertama variabel Institusi dengan 40,00% artinya, rata-rata indikator di dalam variabel Institusi telah terisi pada parameter 1 dan 2. Kemudian variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian yang rata-rata terisi parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



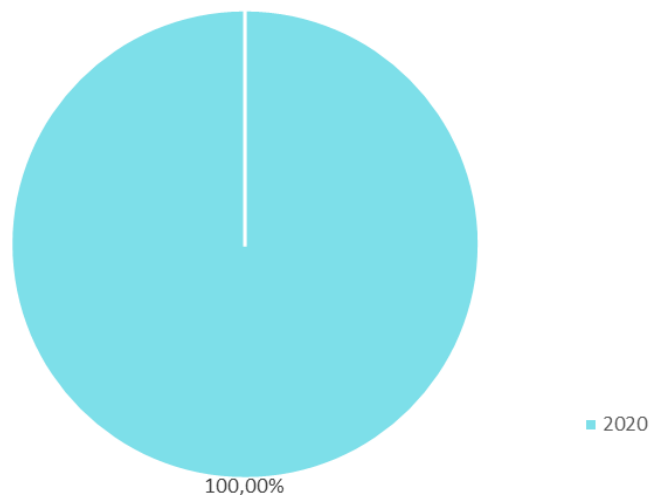
Gambar III Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sungai Penuh

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Sungai Penuh telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data menunjukkan adanya perbaikan pada indikator Jumlah Pendapatan Perkapita yang mengalami naik sebesar 6,46% yang mana nilai ini lebih tinggi dibanding standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1,85%. Kedua, indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Angka tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 0,92%. Ketiga, indikator Angka Kemiskinan juga tidak mengalami perubahan, sebenarnya angka tersebut masih dibawah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun 0,02%. Indeks Pembangunan Manusia tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dimana nilai tersebut sama dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 25,47%, nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang naik sebesar 15,38% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kota Sungai Penuh menunjukkan kenaikan sebesar 4,96%, yang jauh masih di bawah standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 112 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Sungai Penuh

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sungai Penuh telah diterapkan sejak tahun 2020. Inovasi yang diterapkan pada tahun 2019 belum dilaporkan dalam indeks inovasi daerah tahun 2021.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

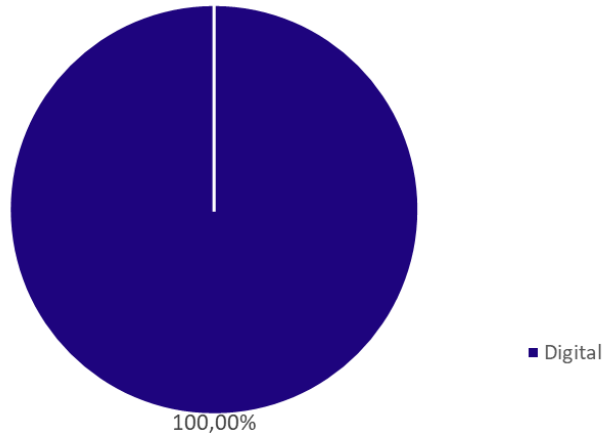


Gambar 113 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Sungai Penuh

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sungai Penuh, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya, sementara

inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 4 (57,14%) inovasi dan 3 (42,86%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

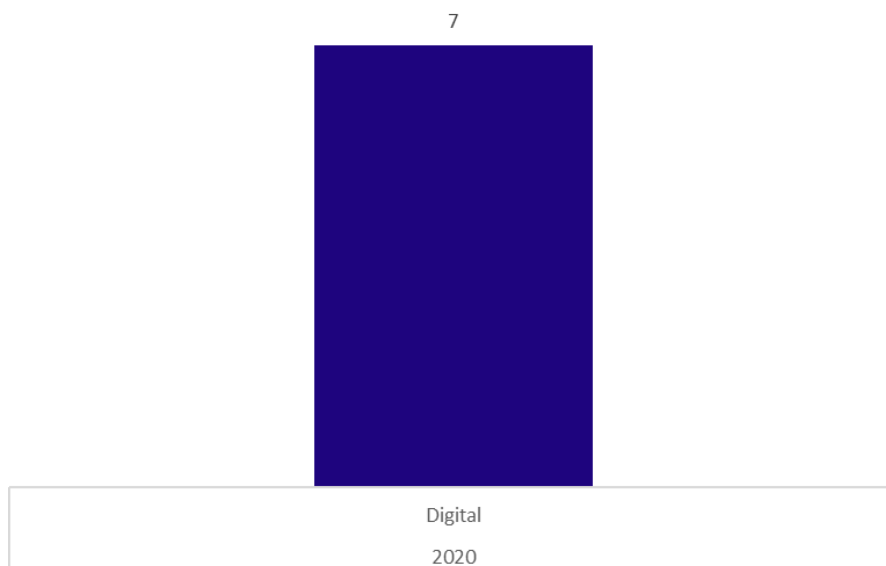
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 114 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Sungai Penuh

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 7 (100%) yang dilaporkan Kota Sungai Penuh merupakan inovasi digital. Belum ada inovasi non digital yang dilaporkan dalam indeks inovasi daerah tahun 2021.

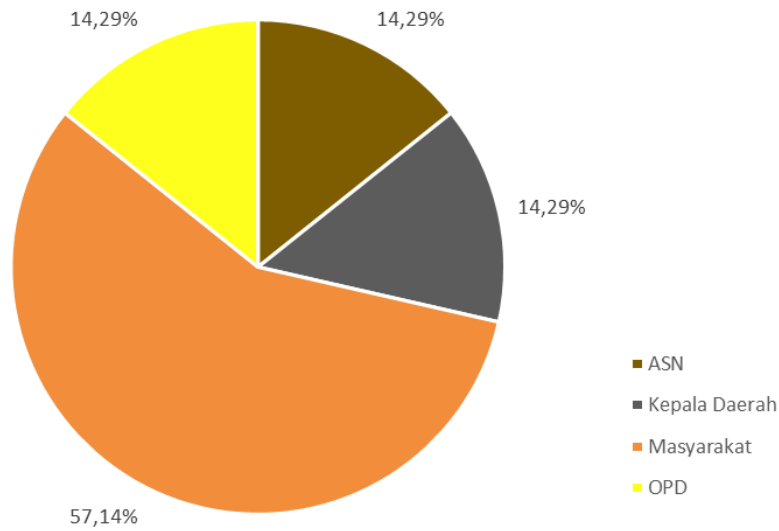
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 115 Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Sungai Penuh

Seluruh inovasi Kota Sungai Penuh dilaporkan pada indeks inovasi daerah tahun 2021 diterapkan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat diukur perkembangan jumlah inovasi non digital dan digital pada tahun 2020 dibanding tahun 2019.

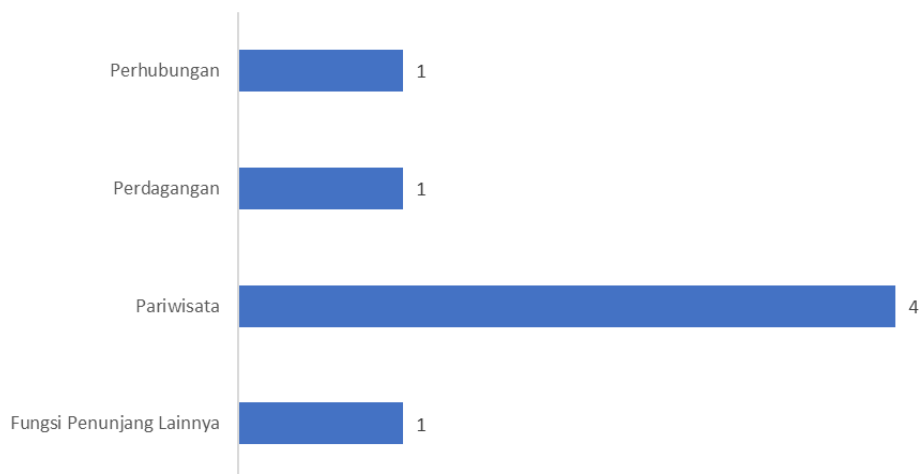
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 116 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Sungai Penuh

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Sungai Penuh pada tahun 2021 diinisiasi oleh Masyarakat, yaitu sejumlah 4 (57,14%) inovasi sementara masing-masing 1 (14,29%) inovasi diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

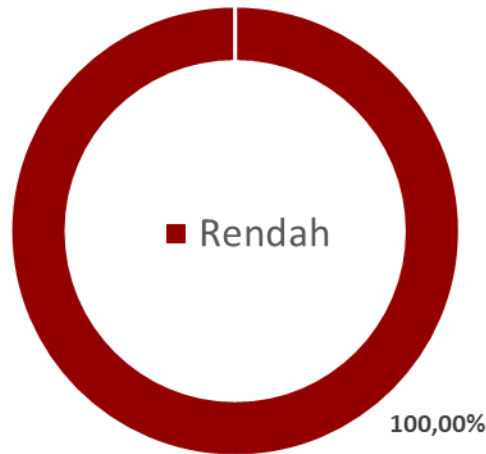
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 117 Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Sungai Penuh

Sebaran inovasi daerah pada Kota Sungai Penuh berdasarkan urusan pemerintahan kurang merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan Pariwisata dengan 4 inovasi kemudian masing-masing 1 inovasi merupakan urusan Perhubungan, Perdagangan, dan Fungsi Penunjang Lainnya. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, tidak terdapat satupun urusan dari 6 urusan wajib pelayanan dasar.

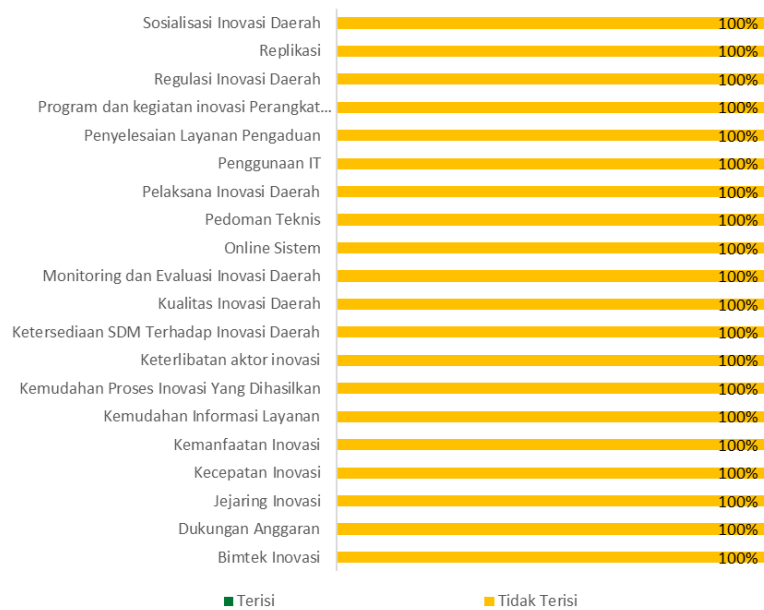
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 118 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Sungai Penuh

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi tergolong dalam skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan tinggi adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 119 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Sungai Penuh

Dari 7 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sungai Penuh, tidak ada bukti dukung yang telah disertakan dalam laporan inovasi pada Indeks Inovasi Daerah.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 120 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dari 7 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Sungai Penuh, tidak ada bukti dukung yang telah disertakan dalam laporan inovasi pada Indeks Inovasi Daerah.

j. Daftar Inovasi Kota Sungai Penuh beserta Skor Kematangannya

Tabel 12 Daftar Inovasi Kota Sungai Penuh beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Pasar Tradisional	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Restoran	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Hotel	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor PTSP	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Tempat Wisata	0
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Transportasi	0
Menuju New Normal	0



BAB III

PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

Pada Provinsi Jambi terdapat 11 Kabupaten/Kota namun tiap daerah memiliki predikat yang berbeda pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021.

A. Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 54,28 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jambi juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Batang Hari melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

B. Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 36,64 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jambi juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Bungo melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

C. Kabupaten Kerinci

Kabupaten Kerinci memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 45,02 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jambi juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Kerinci melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

D. Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 35,63 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jambi juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Merangin melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

E. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 12,19 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah. Namun Provinsi Jambi dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Muaro Jambi melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah.

F. Kabupaten Sarolangon

Kabupaten Sarolangon memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 40,89 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jambi juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Sarolangon melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

G. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 51,29 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jambi juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

H. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 44,76 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jambi juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

I. Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 34,63 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jambi juga dapat melakukan pembinaan kepada Kabupaten Tebo melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

J. Kota Jambi

Kota Jambi memiliki predikat daerah inovatif dengan skor 58,98 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, dan kolaborator inovasi. Namun Provinsi Jambi juga dapat melakukan pembinaan kepada Kota Jambi melalui bentuk pembinaan antara lain: integrasi sistem teknologi Informatika (IT), pengembangan pemerintahan digital, dan manajemen kelitbangan.

K. Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh memiliki predikat daerah kurang inovatif dengan skor 8,88 maka, bentuk pembinaan umum yang dapat dilakukan BSKDN Kemendagri antara lain: pendampingan

penyusunan proposal inovasi, pemberian pelatihan inovasi teknis, dan pemetaan inovasi daerah
Namun Provinsi Jambi dapat melakukan pembinaan kepada Kota Sungai Penuh melalui bentuk pembinaan antara lain: pendampingan penyusunan proposal, pelatihan inovasi teknis bidang, dan Pemetaan inovasi daerah